



DITJEN KEKAYAAN NEGARA  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA



# LAPORAN KINERJA

TAHUN ANGGARAN 2021

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG  
PADANGSIDIMPUAN

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas izin-Nya sehingga KPKNL Padangsidimpuan dapat menyelesaikan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun Anggaran 2021.

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2021 disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja.

Sesuai dengan Reformasi Birokrasi, KPKNL Padangsidimpuan sebagai salah satu unsur Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah menerapkan pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Scorecards* (BSC) sehingga kinerja KPKNL Padangsidimpuan diukur atas dasar Penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan/sasaran-sasaran strategis instansi pada tahun 2021.

LAKIN ini disusun secara sistematis sebagai akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Padangsidimpuan dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis KPKNL Padangsidimpuan pada tahun anggaran 2021 yang tercermin dalam capaian IKU Kemenkeu-*Three* KPKNL Padangsidimpuan Tahun 2021 serta merupakan realisasi dari Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun Anggaran 2021 yang mengacu pada Rencana Kerja Strategis (Renstra) DJKN Tahun 2020-2024.

Dari hasil pengukuran kinerja, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Padangsidimpuan telah mencapai 113,61%. Nilai tersebut berasal dari Capaian Kinerja pada masing-masing perspektif yaitu *Stakeholder Perspective* (30%), *Customer Perspective* (16.34%), *Internal Process Perspective* (33.33%), dan *Learning and Growth Perspective* (33.93%).

Pencapaian tersebut adalah bentuk pelayanan KPKNL Padangsidimpuan kepada stakeholder yang selama ini berkontribusi pada penerimaan negara yang berasal dari pengelolaan kekayaan negara atau aset negara, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang. Hal ini dapat dilihat dari hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan dengan indeks 4,8 dari skala 5.00.

Akhir kata, LAKIN Tahun Anggaran 2021 ini disampaikan sebagai akuntabilitas pelaksanaan tugas kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara dengan harapan semoga bermanfaat sebagai bahan kelengkapan bahan perumusan LAKIN Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara dan bagi para pembaca terutama bagi DJKN.

Kepala KPKNL Padangsidimpuan

Raden Hariyadi Murti Kurniawan

## DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi .....	1
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	5
A. Rencana Strategis.....	5
1. Faktor Penentu Keberhasilan .....	9
2. Tujuan.....	9
3. Sasaran.....	9
4. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran.....	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	15
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	15
B. Realisasi Anggaran.....	28
BAB IV PENUTUP.....	31
A. Pencapaian .....	31
B. Permasalahan dan Kendala.....	31
C. Strategi Pemecahan Masalah untuk Tahun 2022.....	32
LAMPIRAN	

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padangsidimpuan merupakan salah satu instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah (Kanwil) DJKN Sumatera Utara. KPKNL Padangsidimpuan mempunyai tugas untuk melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan Negara, penilaian, piutang negara, dan lelang. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, KPKNL menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
- b. Registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
- c. Registrasi penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung hutang/penjamin hutang;
- d. Penyajian bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan/atau jumlah hutang, usul pencegahan dan penyanderaan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang serta penyajian data usul penghapusan piutang negara;
- e. Pelaksanaan pelayanan penilaian;
- f. Pelaksanaan pelayanan lelang;
- g. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;
- h. Pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau penjamin hutang dan eksekusi barang jaminan;
- i. Pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang atau penjamin hutang serta harta kekayaan lain;
- j. Pelaksanaan bimbingan kepada Pejabat Lelang;
- k. Inventarisasi, pengamanan, dan pendayagunaan barang jaminan;
- l. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang negara dan lelang;
- m. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
- n. Pelaksanaan administrasi KPKNL.

Wilayah kerja KPKNL Padangsidimpuan meliputi 14 wilayah Kabupaten/Kota, antara lain :

1. Kota Padangsidimpuan;
2. Kabupaten Tapanuli Tengah;
3. Kabupaten Tapanuli Utara;
4. kabupaten Tapanuli Selatan;
5. Kabupaten Padang Lawas;
6. Kabupaten Padang Lawas Utara;
7. Kabupaten Mandailing Natal;
8. Kabupaten Humbang Hasundutan
9. Kabupaten Nias;
10. Kabupaten Nias Selatan;
11. Kabupaten Nias Utara;
12. Kabupaten Nias Barat;
13. Kota Gunung Sitoli;
14. Kota Sibolga;



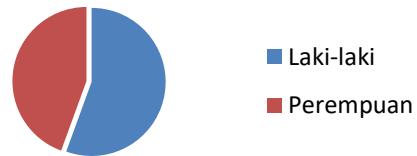
Gbr.1 Wilayah Kerja KPKNL Padangsidimpuan

Susunan Organisasi di KPKNL Padangsidempuan tahun 2021 terdiri dari:

- a. **Subbagian Umum** yang mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, serta penatausahaan, pengamanan, dan pengawasan barang milik negara di lingkungan KPKNL;
- b. **Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara** yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian, penatausahaan dan akuntansi serta penyusunan daftar barang milik negara/kekayaan negara;
- c. **Seksi Pelayanan Penilaian** yang mempunyai tugas melakukan penilaian yang meliputi identifikasi permasalahan, survey pendahuluan, pengumpulan dan analisa data, penerapan metode penilaian, rekonsiliasi nilai, kesimpulan nilai dan laporan penilaian terhadap obyek-obyek penilaian sesuai dengan ketentuan, serta penyusunan basai data penilaian;
- d. **Seksi Piutang Negara** yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang, pemblokiran, pelaksanaan PB/PJPN, pemberian pertimbangan keringanan hutang, pengusulan pencegahan ke luar wilayah RI, pengusulan dan pelaksanaan paksa badan, penyiapan pertimbangan penyelesaian atau penghapusan piutang negara, usul pemblokiran surat berharga milik penanggung/penjamin hutang yang diperdagangkan di bursa efek, usul untuk memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah debitur, pengelolaan dan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang;
- e. **Seksi Pelayanan Lelang** yang mempunyai tugas melakukan pemeriksaan dokumen persyaratan lelang, penyiapan dan pelaksanaan lelang, serta penatausahaan minuta risalah lelang, pembuatan salinan, kutipan dan grosse risalah lelang, penatausahaan hasil lelang, penggalan potensi lelang, pelaksanaan lelang kayu kecil PT. Perhutani (Persero) dan penatausahaan bea lelang Pegadaian;
- f. **Seksi Hukum dan Informasi** yang mempunyai tugas melakukan penanganan perkara, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, jaringan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan, implementasi sistem aplikasi, penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas, dan laporan tahunan, penatausahaan berkas kasus piutang negara, serta verifikasi pembayaran piutang negara dan hasil lelang;
- g. **Seksi Kepatuhan Internal** yang mempunyai tugas melakukan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta pengurusan rekomendasi perbaikan proses bisnis; dan
- h. **Kelompok Jabatan Fungsional** yang mempunyai tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing. Jabatan Fungsional yang ada di KPKNL Padangsidempuan yang terdiri dari dua yaitu Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah dan Pelelang.
  - 1) Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan di bidang penilaian properti dan/atau bisnis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tugas jabatan Penilai Pemerintah yaitu melaksanakan kegiatan di bidang penilaian properti dan/atau bisnis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 2) Jabatan Fungsional Pelelang adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan lelang dalam lingkungan instansi pemerintah. Pejabat Fungsional Pelelang mempunyai tugas pokok melaksanakan Lelang Eksekusi, Lelang Noneksekusi Wajib, dan Lelang Noneksekusi Sukarela.

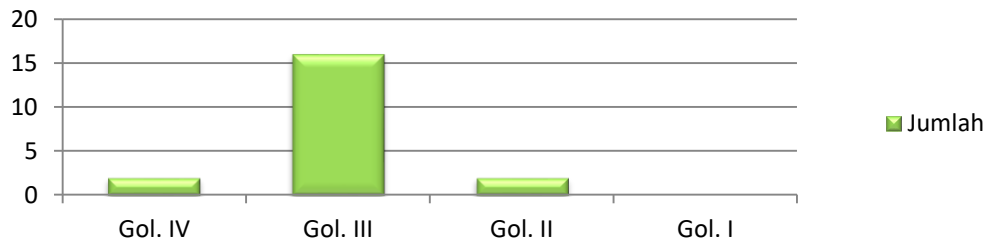
Sumber daya manusia di unit organisasi KPKNL Padangsidempuan pada akhir tahun 2021 berjumlah 27 pegawai dengan komposisi sebagai berikut:

1. Berdasarkan Jenis Kelamin adalah
  - a. Laki-laki : 15 orang
  - b. Perempuan : 12 orang



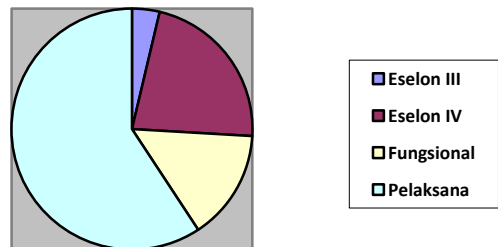
Grafik 1. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

2. Berdasarkan pangkat dan golongan adalah:
  - a. Gol. IV : 2 orang
  - b. Gol. III : 16 orang
  - c. Gol. II : 9 orang
  - d. Gol. I : -



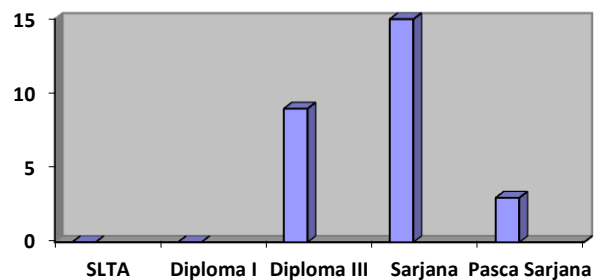
Grafik 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan

3. Berdasarkan Eselon/yang menduduki jabatan adalah:
  - a. Eselon III/a : 1 orang
  - b. Pejabat Fungsional : 4 orang
  - c. Eselon IV/a : 6 orang
  - d. Pelaksana : 16 orang



Grafik 3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

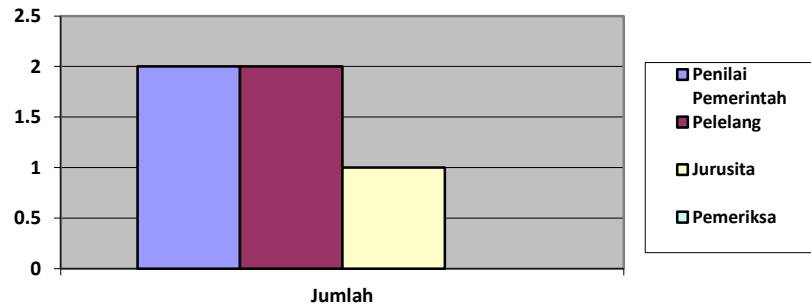
4. Berdasarkan tingkat pendidikan adalah:
  - a. SLTA : -
  - b. Program Diploma I : -
  - c. Program Diploma III : 9 orang
  - d. Program Diploma IV/Sarjana : 15 orang
  - e. Pasca Sarjana : 3 orang



Grafik 4. Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

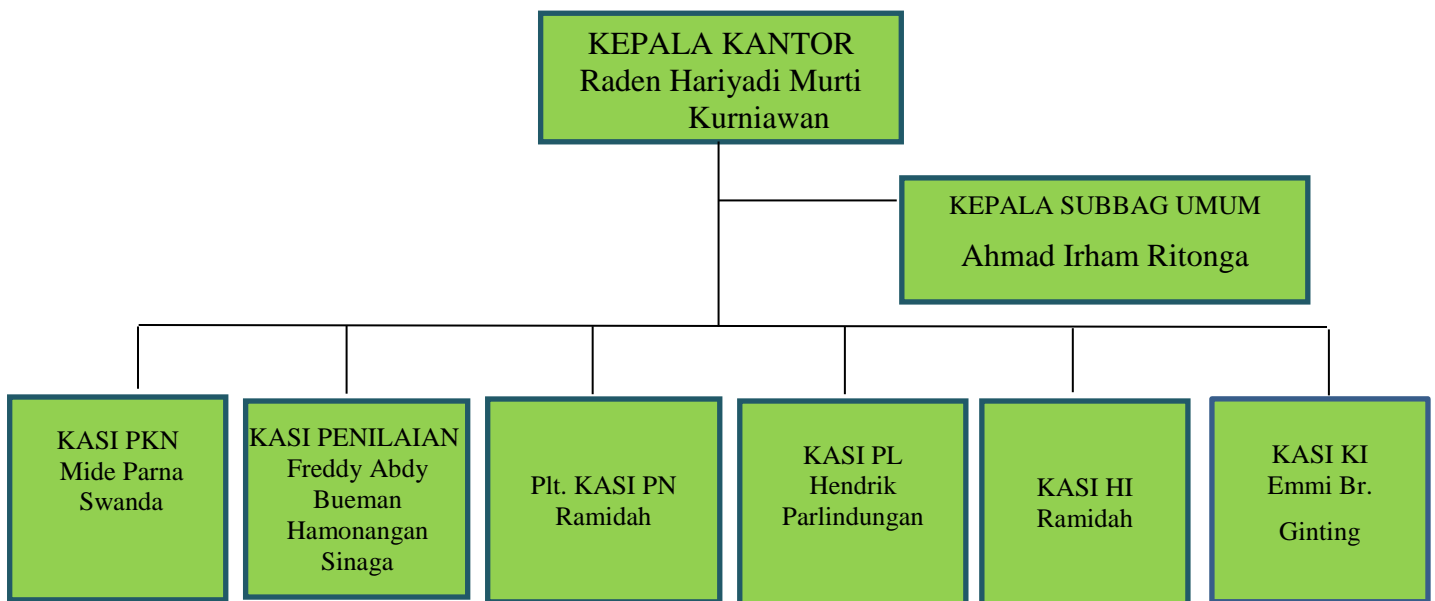
5. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan sesuai dengan Kompetensinya pada KPKNL Padangsidempuan adalah:

- a. Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah : 2 orang
- b. Jabatan Fungsional Pelelang : 2 orang
- c. Jurusita : 1 orang
- d. Pemeriksa : -



Grafik 4. Jumlah Pejabat Fungsional

Bagan Organisasi KPKNL Padangsidempuan dapat dilihat pada gambar berikut :

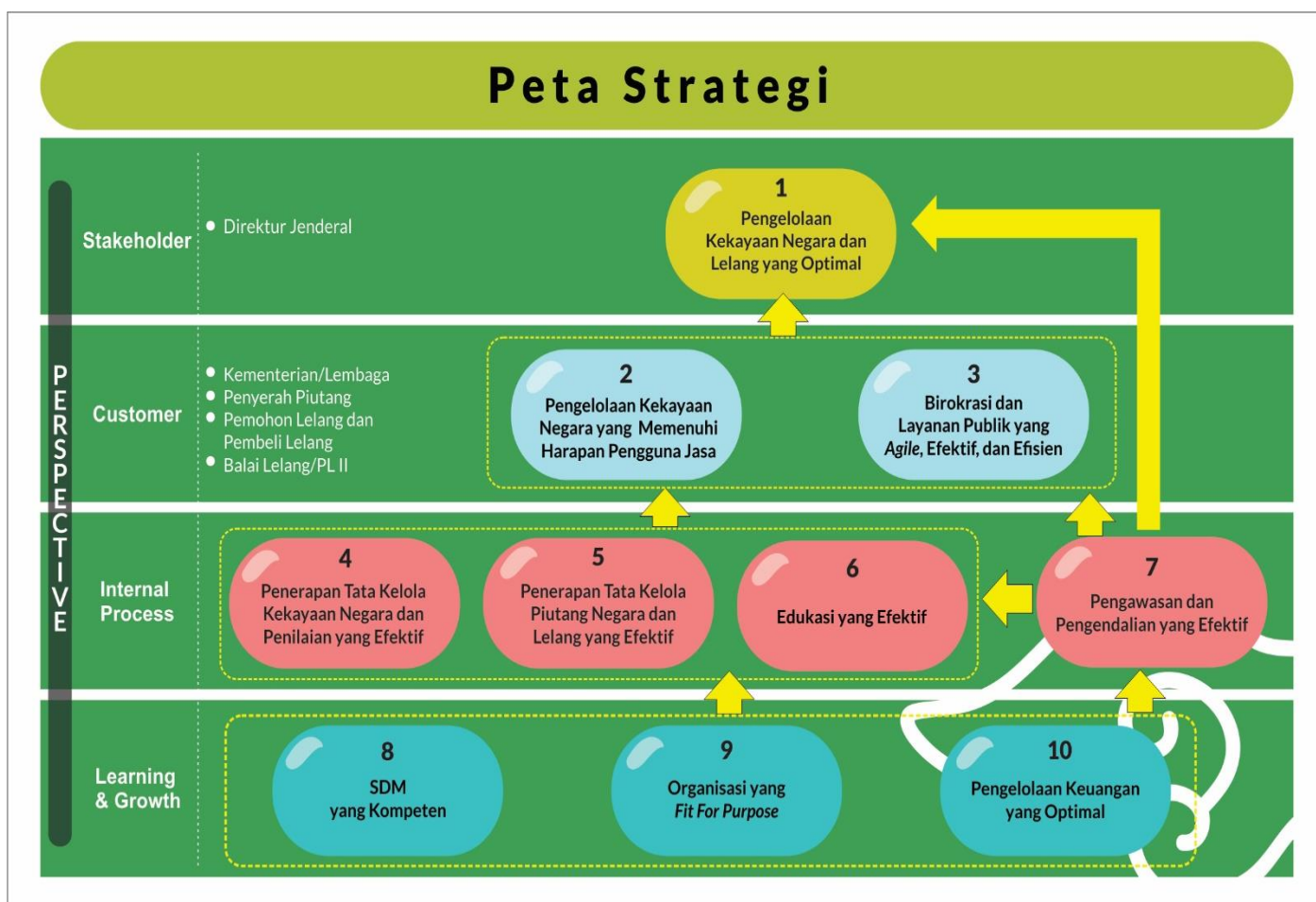


## BAB II PERENCANAAN KINERJA

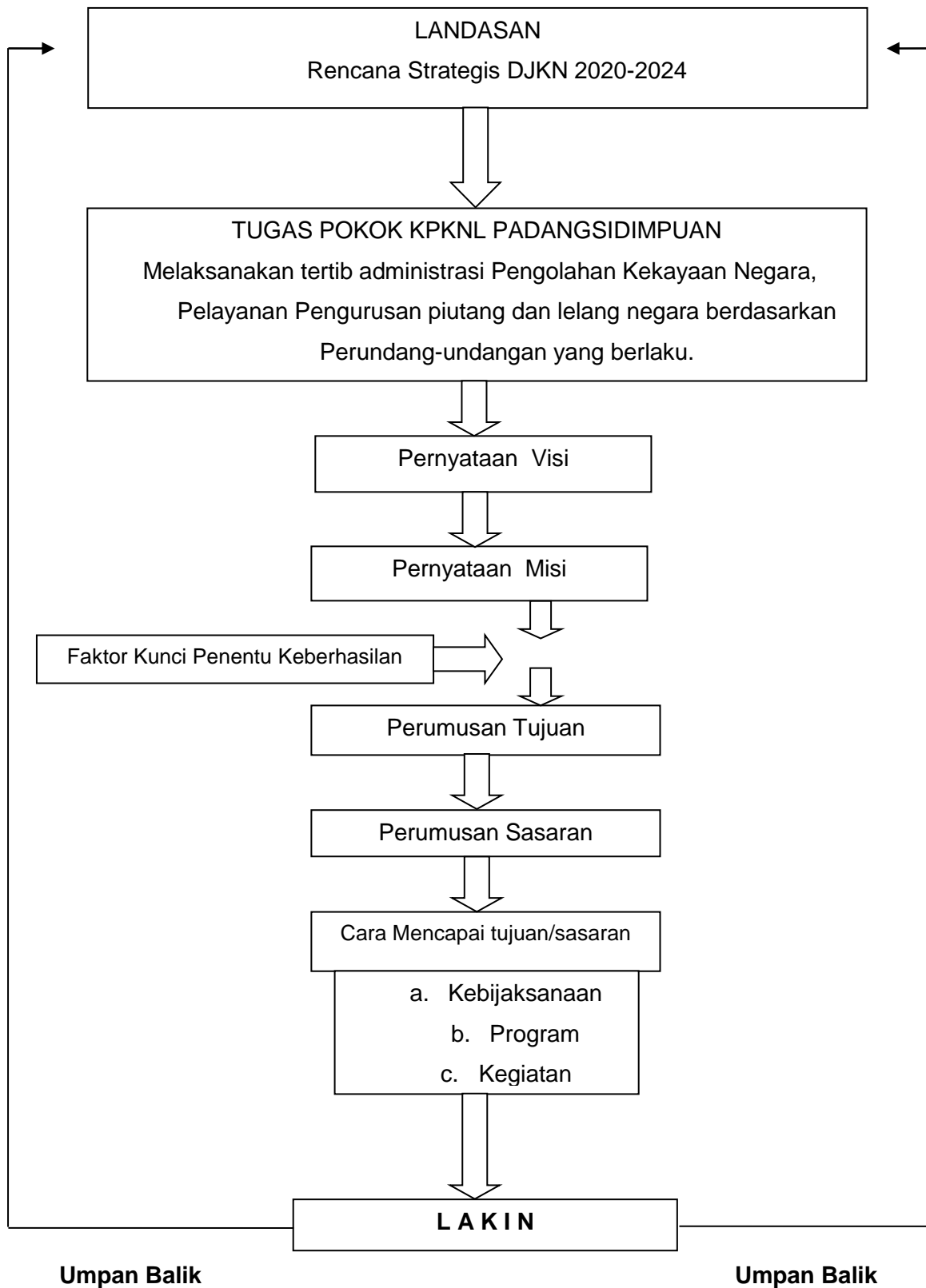
### A. Rencana Strategis

#### Peta Strategi KPKNL Padangsidimpuan Tahun 2021

**VISI DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
Menjadi Pengelola Kekayaan Negara Yang Profesional Dan Akuntabel Dalam Rangka Mendukung Visi Kementerian Keuangan, Menjadi Pengelola Keuangan Negara Untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia Yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, Dan Berkeadilan, Serta Sebesar-Besar Kemakmuran Rakyat



**Gambar Peta Strategi KPKNL Padangsidimpuan TA 2021**



Sebagai salah satu unit vertikal dari Instansi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang berada di daerah, KPKNL Padangsidimpuan telah berusaha untuk menjadi aparat yang profesional dan akuntabel yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna, bersih dari segala bentuk penyalagunaan wewenang dan dapat mempertanggungjawabkan capaian pencapaian visi dan misi yang dibebankan.

Dalam rangka perwujudan atas kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pencapaian pelaksanaan tugas pokok yang menjadi tanggung jawabnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, maka disusunlah Laporan Kinerja (LAKIN) KPKNL Padangsidimpuan Tahun 2021 ini yang mengacu kepada Perjanjian Kinerja/Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2021.

Di dalam LAKIN ini tergambar mengenai tingkat capaian KPKNL Padangsidimpuan dalam melaksanakan kegiatannya sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Tingkat capaian dalam melaksanakan tugas pokok dalam pengelolaan kekayaan negara, pelayanan penilaian, pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang, tidak terlepas dari berbagai perkembangan baik internal maupun eksternal serta upaya-upaya yang selama ini telah dilaksanakan untuk mengatasi berbagai hambatan atau permasalahan yang timbul di lapangan.

KPKNL Padangsidimpuan sebagai kantor pelayanan, dengan jumlah pegawai 27 orang pegawai terdiri dari 6 orang pejabat struktural, 4 orang pejabat fungsional baik ahli pertama maupun ahli muda dan 16 orang pelaksana serta 11 pegawai PPNPN, tetap melaksanakan berbagai upaya untuk tercapainya target yang dibebankan dengan sarana dan prasarana yang ada.

Dalam menjawab tantangan tersebut dan sejalan dengan kebijakan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, maka diperlukan suatu visi yang sama yaitu Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan, Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedang untuk mewujudkan visi tersebut KPKNL Padangsidimpuan dituntut untuk selalu mengikuti berbagai tuntutan perkembangan pengguna jasa/*stakeholder* diantaranya kreditur, debitur maupun instansi/lembaga terkait dan masyarakat luas sehingga diperlukan aparat KPKNL yang akuntabel yang mampu menjalankan tugas dan fungsi secara berdaya guna dan berhasil guna, bersih dari berbagai penyalahgunaan wewenang, dapat mempertanggungjawabkan atas keberhasilan/kegagalan visi maupun misi yang dibebankan secara transparan sehingga dapat membentuk suatu instansi pemerintah yang menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar (*good governance*) yang didasarkan pada peraturan perundang undangan yang berlaku.

Sebagai dasar pertimbangan disusunnya LAKIN KPKNL Padangsidimpuan adalah:

- 1) Rencana Strategi KPKNL Padangsidimpuan (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara 2020-2024);
- 2) Prototipe LAKIN KPKNL Padangsidimpuan tahun 2021;
- 3) Perjanjian Kinerja/Rencana Kinerja Tahunan (RKT) KPKNL Padangsidimpuan Tahun 2021.

Dengan tersusunnya LAKIN ini diharapkan :

- 1) Mendorong motivasi pegawai KPKNL Padangsidempuan untuk meningkatkan kinerjanya;
- 2) Sebagai evaluasi, masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah;
- 3) Mewujudkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Perencanaan Strategi adalah merupakan serangkaian rencana tindakan yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien dan koordinatif serta disusun mengikuti alur pikir sebagaimana bagian di muka. Rencana strategis juga mengakui proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Rencana strategis tersebut mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijaksanaan program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Sejalan dengan visi DJKN, KPKNL Padangsidempuan yang merupakan instansi vertikal dibawahnya menekankan visi yang sama, yaitu ” **Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan, Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat**”.

Selain itu, KPKNL Padangsidempuan berkomitmen mewujudkan cita-cita besar sebagai *Distinguished Asset Manager*. *Distinguished Asset Manager* sendiri memiliki arti yaitu manajer asset yang memiliki karakteristik dan prinsip kontributif, instrumental, otoritatif, berkelanjutan, dan adaptif. Penjabaran lebih lanjut karakter tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kontributif berarti bahwa hasil pengelolaan kekayaan Negara dapat mendorong perekonomian nasional melalui aspek penerimaan, belanja, dan pembiayaan APBN serta andil dalam penyediaan infrastruktur yang menjadi tulang punggung dan katalisator pembangunan nasional;
- b. Instrumental berarti bahwa pengelolaan kekayaan Negara memiliki peran penting dalam keuangan Negara melalui peran konsultatif, implemenatif, dan pengawasan efektif dalam manajemen asset dan investasi;
- c. Otoritatif berarti bahwa pengelolaan kekayaan Negara DJKN menjadi acuan yang paling berpengaruh dalam tataran teoritis maupun praktis yang dapat diadopsi dan di replikasi oleh manajer asset lain di level nasional dan internasional;
- d. Berkelanjutan diwujudkan melalui peningkatan tata kelola dan nilai tambah asset dan investasi pemerintah yang mengurangi eksposur APBN karena adanya kemandirian finansial dan risiko yang minimum;
- e. Adaptif berarti bahwa pengelolaan kekayaan Negara mampu mengambil peluang dan responsive terhadap perkembangan teknologi, perubahan iklim, tujuan pembangunan berkelanjutan, dan dinamika kontemporer lainnya;

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan, maka KPKNL Padangsidempuan menjalankan **Misi DJKN**, yang terdiri dari :

- 1) Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
- 2) Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
- 3) Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelola kekayaan negara;

- 4) Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
- 5) Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

### **1. FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN (*CRITICAL SUCCESSION FACTORS*)**

*Critical Success Factor* adalah faktor penentu keberhasilan yang mencakup berbagai bidang/aspek dari misi yang sangat mempengaruhi keberhasilan kinerja KPKNL Padangsidempuan.

Adapun faktor-faktor penentu keberhasilan tersebut adalah sebagai berikut;

- 1) Semakin mantapnya status organisasi menjadi DJKN yang sebelumnya adalah DJPLN (sesuai Perpres No. 66 Tahun 2006 tanggal 08 Juni 2006 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan);
- 2) Adanya ketentuan/aturan pengelolaan Kekayaan Negara, pengurusan piutang dan Pelayanan lelang yang semakin mengarah kepada upaya-upaya regulasi dan pelayanan terhadap pengguna jasa atau masyarakat umumnya;
- 3) Adanya rencana kerja yang komprehensif dalam upaya pencapaian target pengurusan piutang dan lelang negara sehingga dapat mengoptimalkan kinerja maupun sebagai evaluasi dalam rangka menuju kepada visi dan misi DJKN;
- 4) Tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan performa pegawai yang baik;
- 5) Terjalannya koordinasi yang cukup baik dengan Instansi Pemerintah, kreditor, sebagai mitra Kerja KPKNL Padangsidempuan;
- 6) Ditetapkannya Nilai-Nilai Kementerian Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas, yaitu Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan.

### **2. TUJUAN**

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu, satu sampai dengan lima tahun ke depan. Adapun tujuan dari misi yang dijalankan oleh KPKNL Padangsidempuan adalah:

- 1) Terwujudnya suatu sistem administrasi pengelolaan Kekayaan Negara, pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang lebih efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan serta lebih menjamin kepastian hukum;
- 2) Terciptanya pengelolaan administrasi kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang optimal sehingga lebih memberikan kepuasan kepada Instansi Pemerintah, penyerah piutang, penanggung hutang, pengguna jasa lelang dan pihak lain yang terkait;
- 3) Peningkatan perolehan hak penyerah piutang, penanggung hutang, pemohon lelang dan kontribusi penerimaan negara;
- 4) Terwujudnya organisasi yang lebih akomodatif terhadap perkembangan tuntutan dan kondisi;
- 5) Terselenggaranya pelayanan informasi data yang efektif dan efisien.

### **3. SASARAN**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semester atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur dan menantang namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode satu tahun pada masa sekarang. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka KPKNL Padangsidempuan menetapkan sasaran sebagai berikut:

- 1) Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara

- a) Terlaksananya Penyusunan *Database* Kekayaan Negara;
  - b) Terciptanya tertib administrasi penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Negara;
  - c) Terciptanya Tertib Administrasi Kekayaan Negara secara tertib dan berkesinambungan;
  - d) Terlaksananya Sertifikasi Kekayaan Negara atas nama Pemerintah Republik Indonesia.
- 2) Bidang Pengurusan Piutang Negara
- a) Terciptanya peningkatan pengurusan piutang negara meliputi : PNDS, PSBDT dan hasil produk administrasi pengurusan;
  - b) Terciptanya koordinasi yang baik dengan seluruh instansi terkait;
  - c) Optimalisasi penyelesaian outstanding Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN);
  - d) Terselenggaranya tertib administrasi pengurusan piutang negara;
  - e) Optimalisasi pengelolaan barangjaminan;
  - f) Meningkatkan kemampuan SDM dalam melaksanakan kejurusitaan maupun appraisal barang jaminan sehingga produk yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan;
  - g) Terselenggaranya pelayanan prima dibidang pengurusan piutang negara.
- 3) Bidang Lelang
- a) Optimalisasi hasil lelang sehingga tercapai hasil lelang, sesuai target yang ditetapkan;
  - b) Meningkatnya pemohon lelang melalui penggalian potensi lelang;
  - c) Terselenggaranya tertib administrasi lelang;
  - d) Terciptanya citra lelang yang lebih baik;
  - e) Terselenggaranya pelayanan prima di bidang lelang;
  - f) Meningkatnya kemampuan SDM terutama Pejabat Lelang dalam melaksanakan lelang.
- 4) Bidang Hukum dan Informasi
- a) Terciptanya pelayanan dalam bidang informasi dan verifikasi pengurusan piutang negara dan lelang secara terintegrasi dan komprehensif;
  - b) Tertib administrasi pembukuan bendahara penerimaan dan laporan bulanan, semesteran, dan tahunan;
  - c) Terciptanya sistem administrasi informasi pengurusan piutang dan lelang negara;
  - d) Terselenggaranya penanganan perkara/gugatan baik di Peradilan Umum maupun Peradilan Tata Usaha Negara dengan baik;
  - e) Meminimalisasi kesalahan dalam penerbitan produk-produk hukum PUPN maupun dalam pelaksanaan proses pengurusan piutang negara dan lelang.
- 5) Bidang Umum
- a) Tercapainya organisasi yang responsif terhadap perkembangan situasi dan kondisi serta fungsi dan tugas pokok organisasi;
  - b) Tersedianya SDM yang berkualitas;
  - c) Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai;
  - d) Terpenuhinya hak dan kewajiban pegawai KPKNL Padang Sidempuan;
  - e) Terciptanya disiplin para pegawai.

#### **4. CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN**

Untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka yang perlu dilakukan adalah menetapkan cara pencapaiannya dengan menentukan program dan kegiatan yang merupakan perwujudan dari kebijakan operasional.

Cara pencapaian tujuan dan sasaran dituangkan dalam kebijaksanaan, program dan kegiatan yang dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 tahun.

## 1) Kebijakan

Kebijaksanaan pada dasarnya merupakan ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

Kebijaksanaan yang dilakukan oleh KPKNL Padangsidimpuan meliputi:

- a) Bidang Administrasi Kekayaan Negara
  - Peningkatan Administrasi Kekayaan Negara;
  - Peningkatan Administrasi Penilaian;
  - Peningkatan Pelaksanaan Database Kekayaan Negara (Modul KN)
- b) Bidang Pengurusan Piutang Negara.
  - Peningkatan kualitas pelayanan pengurusan piutang negara;
  - Peningkatan kualitas pengelotaan barang jaminan.
- c) Bidang Lelang.
  - Peningkatan kualitas pelayanan lelang.
- d) Bidang Hukum dan Informasi
  - Peningkatan kualitas penyajian informasi dan penatausahaan Administrasi Kekayaan Negara, pengurusan piutang Negara dan Pelayanan lelang, serta pengoptimalan penanganan perkara.
- e) Bidang Tata Usaha/sarana penunjang.
  - Peningkatan pembelian dukungan teknis dan administrasi pengurusan piutang Negara dan lelang.

## 2) Program

Program adalah merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah atau dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Program-program yang ditetapkan untuk masing-masing kebijaksanaan adalah sebagai berikut:

- a) Bidang pengurusan piutang negara.
  - Peningkatan kualitas pelayanan pengurusan piutang negara:
    - Percepatan pelayanan pengurusan piutang negara.
  - Peningkatan kualitas pengelolaan barang jaminan:
    - Pengamanan barang jaminan.
- b) Bidang lelang.
  - Peningkatan kualitas pelayanan lelang:
    - Percepatan pelayanan lelang.
- c) Bidang Hukum dan Informasi.
  - Peningkatan kualitas penyajian informasi dan penata usaha pengurus piutang dan lelang negara serta pengoptimalan penanganan perkara:
    - Mengoptimalkan sistem administrasi data Pengurusan Piutang Negara dan pelayanan lelang;
    - Mengoptimalkan upaya penyelesaian perkara;
    - Mengoptimalkan kehumasan dan publikasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Padangsidimpuan.

d) Bidang Umum

- pelayanan di bidang kepegawaian;
- pelayanan di bidang keuangan;
- pelayanan di bidang umum.

### 3) Kegiatan

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan kebijaksanaan dan program yang telah ditetapkan. Kegiatan dilakukan juga oleh masyarakat sebagai respon terhadap kebijaksanaan/program yang dikembangkan instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Rincian kegiatan yang sesuai dengan masing-masing program adalah sbb;

a) Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kekayaan Negara:

- Melakukan Penilaian Barang Milik Negara;
- Melaksanakan Penyusunan *Database* Barang Milik Negara;
- Menyelenggarakan Inventarisasi/Pendataan Barang Milik Negara yang digunakan, dimanfaatkan, dipindahtangankan dan/atau dihapuskan secara periodik;
- Menyelenggarakan Pelaporan Barang Milik Negara yang digunakan, dimanfaatkan, dipindahtangankan dan dihapuskan;
- Menyusun *Database* BMN berupa tanah/bangunan *idle* pada Kementerian/Lembaga Negara;
- Menyusun *Database* BMN selain tanah/Bangunan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi;
- Mengamankan Administrasi BMN;
- Menetapkan Status Penggunaan BMN;
- Menertibkan Penggunaan BMN dalam rangka Penyelenggaraan Tupoksi dan Menunjang Penyelenggaraan Tupoksi;
- Menerbitkan Persetujuan Penghapusan BMN berupa tanah/bangunan;
- Melakukan Penilaian BMN dalam rangka penyusunan daftar BMN sebagai *input* dalam Proses Penyusunan Laporan Keuangan;
- Melakukan Penilaian BMN dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan dan Pemindah-tanganan;
- Melakukan Kegiatan Administrasi (Pencatatan baru, mutasi) Kekayaan Negara;
- Melakukan Inventarisasi Bukti Kepemilikan Kekayaan Negara;
- Menyelenggarakan Inventarisasi Kekayaan Negara Lainnya yang berupa barang tidak bertuan, barang temuan, barang cagar budaya, barang sitaan harta karun, barang nasionalisasi atas eks. Aset asing/Cina;
- Menyelenggarakan Optimalisasi Kekayaan Negara lainnya;
- Menyelenggarakan Dokumentasi Kekayaan Negara lainnya;
- Menyelenggarakan Pengelolaan dan Menyelesaikan Permasalahan status atas barang tidak bertuan, barang temuan, barang cagar budaya, barang sitaan harta karun, barang nasionalisasi atas eks. Aset asing/Cina.

b) Percepatan pelayanan pengurusan piutang Negara.

- Melayani penyerahan Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN);
- Melakukan panggilan terhadap para debitur untuk menyelesaikan hutang;
- Membuat PB;
- Membuat peringatan PB;

- Membuat SP;
  - Melaksanakan penyampaian SP;
  - Membuat SPS;
  - Melakukan penyitaan;
  - Menerbitkan SPPBS;
  - Mengumumkan lelang barang eksekusi PUPN;
  - Melaksanakan lelang eksekusi PUPN;
  - Melayani penjualan diluar lelang;
  - Melakukan pemeriksaan terhadap kemampuan PH/PJH serta harta kekayaan lainnya;
  - Membuat surat pencegahan terhadap PH/PJH;
  - Melakukan paksa badan baik terhadap PH/PJH;
  - Memberikan keringanan hutang kepada PH/Penjaminan Hutang;
  - Melayani permohonan penarikan BKPN.
- c) Pengamanan Barang Jaminan
- Melakukan pemeriksaan barang Jaminan;
  - Penilaian barangjaminan;
  - Penerimaan/penatausahaan penyimpanan asli dokumen barang jaminan:
  - Pemblokiran barang jaminan;
  - Pencabutan pemblokiran barang jaminan;
  - Penatausahaan pengeluaran/penyerahan dokumen asli barang Jaminan.
- d) Percepatan Pelayanan Lelang
- Melayani permohonan lelang;
  - Melayani permintaan salinan dan kutipan risalah lelang;
  - Menggali potensi lelang dan penyebarluasan informasi lelang;
  - Melakukan pemeriksa Pejabat Lelang Kelas II;
  - Melaksanakan pembinaan Pejabat Lelang Kelas II;
  - Membuat laporan pertanggungjawaban lelang;
  - Membuat laporan kegiatan lelang;
- e) Mengoptimalkan Sistim Administrasi Data Pengurusan piutang Negara dan pelayanan lelang
- Melakukan registrasi BKPN;
  - Memantau perkembangan BKPN;
  - Melakukan verifikasi BKPN;
  - Menyusun rencana target Pengurusan piutang Negara dan lelang;
  - Menatausahakan hasil Pengurusan piutang Negara dan lelang;
- f) Mengoptimalkan Upaya Penyelesaian Perkara
- Menangani perkara hukum di Pengadilan Umum dan Pengadilan Tata Usaha Negara;
  - Menangani perkara tingkat Banding;
  - Menangani perkara tingkat Kasasi;
- g) Pelayanan dibidang Kepegawaian
- Melakukan pengawasan pegawai;
  - Melakukan administrasi kepegawaian;
  - Melakukan penegakan disiplin pegawai;
  - Memberi izin cuti pegawai;

h) Pelayanan di bidang Keuangan

- Menyusun RKAKL;
- Mengelola keuangan;
- Membayar tagihan/kewajiban yang menjadi tanggung jawab KPKNL;
- Meningkatkan sarana dan prasarana;
- Membangun/memelihara gedung kantor;
- Membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;

i) Pelayanan di bidang Umum

- Melaksanakan pengadaan barang dan jasa;
- Melaksanakan inventarisasi barang-barang inventaris.

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Capaian Kinerja Organisasi

Ikhtisar Capaian Kinerja Organisasi (CKO) KPKNL Padangsidimpun Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-Three KPKNL Padangsidimpun Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No.	Kode IKU	Uraian IKU	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Persentase (%)
1	1a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	100.53%	62%	75.19%	120%
2	1b-CP	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	82.11%	100%	127.42%	120%
3	1c-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara (Saldo PNDS sd 2017)	3.08%	100%	142%	120%
4	2a-CP	Indeks Ketepatan Waktu Layanan Kekayaan Negara dan Lelang	98.57	88.00	99.30	112.84%
5	2b-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	63.88%	100%	165.47%	120%
6	3a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	4.78	4.75	4.80	101.05%
7	4a-CP	Persentase Bidang Tanah BMN yang disetipikatkan	101.37%	100%	126.50%	120%
8	4b-CP	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Porfolio Aset)	122.22%	100%	123.88%	120%
9	4c-CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	1.34%	22%	3.79%	120%
10	5a-CP	Persentase Efektivitas Penyelesaian BKP	123.91%	100%	100.00%	100%
11	5b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	37.59%	35.00%	44.48%	120%
12	5c-CP	Persentase Pelaksanaan Lelang E-auction dan E-convention Auction	100%	92.00%	100.00%	108.70%
13	5d-CP	Deviasi Data PNBFP Fungsional DJKN		12.50%	0.00%	120%
14	6a-N	Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi	90.23	89	93.22	104.74%
15	7a-CP	Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara	96.55%	85%	91.38%	107.51%
16	8a-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	120.00%	100%	120.00%	120%
17	9a-N	Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI menuju WBK/WBBM		75	98.28	120%
18	9b-N	Nilai Hasil Review Pengelolaan Kinerja	83.46	75.00	99.75	120%
19	11c-N	Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	96.14	80	99.48	120%
20	10a-CP	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	99.12%	95.5%	94,85%	99,32%
Nilai Kinerja Organisasi						113,61%

Terdapat 20 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dalam Kemenkeu-Three KPKNL Padangsidimpun Tahun 2021 sebagaimana tergambar dalam tabel di atas, dimana 19 IKU telah memenuhi target dengan status capaian HIJAU atau tingkat pencapaian target  $\geq 100\%$  dan 1 IKU dengan status capaian KUNING yaitu Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dengan realisasi 94,85%. Pada tahun 2021 terdapat 2 IKU baru sehingga tidak ada data realisasi dari tahun

sebelumnya. Secara keseluruhan, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Padangsidimpuan pada tahun 2021 mencapai 113,61% dengan status capaian HIJAU.

Untuk selanjutnya berikut ini kami sajikan analisis dan evaluasi atas pencapaian target setiap IKU dalam Kemenkeu-*Three* KPKNL Padangsidimpuan Tahun 2021.

## 1. Sasaran Strategis (SS) 1 : Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal

### ➤ Indikator Kinerja Utama 1.1 : Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK

IKU ini adalah penggunaan Barang Milik Negara yang sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara (SBSK BMN) atas pengelolaan Aset Negara termasuk existing luasan BMN satker yang sedang dimanfaatkan dengan persetujuan Pengelola Barang. Capaian diperoleh dari membandingkan total BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan/Gedung Kantor dan Rumah Negara/Mess pada Satker target di wilayah kerja KPKNL yang telah selesai pengukuran Standar Barang dan Standar Kebutuhannya, dengan total BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan/Gedung Kantor dan Rumah Negara/Mess pada Satker target di wilayah KPKNL Padangsidimpuan. Hasil pengukuran pengukuran SBSK dituangkan dalam kertas kerja perhitungan atas setiap BMN yang diukur SBSK-nya.

Persentase pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 62.1% dengan realisasi sebesar 75,19% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 120% (indeks tanpa batas) dengan status capaian HIJAU. Terdapat selisih penurunan realisasi capaian antara realisasi capaian tahun 2021 dengan tahun 2020 sebesar 25,34% dikarenakan ada perbedaan ketentuan perhitungan capaian dan rumus pada form SBSK sehingga mempengaruhi nilai akhir capaian SBSK. Secara keseluruhan tidak ada kendala yg signifikan terhadap IKU tersebut, namun diperlukan koordinasi dengan Kanwil DJKN Sumatera Utara agar data perhitungan capaian sesuai.

Tabel 1.1  
Capaian Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK

Kode IKU	Uraian IKU	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Persentase (%)
1a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	188	62%	75.19%	120.00

### ➤ Indikator Kinerja Utama 1.2 : Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang

Berdasarkan Pasal 28 Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, ruang lingkup pengelolaan kekayaan negara meliputi pengelolaan barang milik negara (BMN), kekayaan negara yang dipisahkan (KND), kekayaan negara lain-lain (KNL) penilaian, piutang negara dan lelang. Dalam pencapaian strategis ini, KPKNL Padangsidimpuan mengidentifikasi ada 3 sasaran strategis persentase penerimaan negara yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang target pencapaian keseluruhan sebesar 100%, yaitu berupa :

- a. PNBP Aset, Besar Penerimaan Negara yang bersumber dari PNBP Aset ditargetkan sebesar Rp2.800.000.000,- atau 100% dan realisasi capaian didapatkan adalah sebesar Rp3.603.114.982,- atau 128,68% (indeks tanpa batas) dengan status capaian HIJAU. Persentase capaian kinerja dari PNBP Aset ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan pada tahun 2020.

- b. PNBPN Piutang Negara, Total realisasi PNBPN Piutang Negara yang dapat dicapai tahun 2021 adalah sebesar Rp.36.523.612,63 atau 102,31% dari target addendum yang ditetapkan sebesar Rp 35.700.000,00 atau 100% (dari target awal tahun 2021 sebesar Rp 5.000.000,00). IKU PNBPN PN dapat tercapai karena penagihan yang dilakukan oleh seksi terkait, baik secara *on the spot*, komunikasi via telepon serta Kebijakan *Crash Program / Keringanan Utang* melalui PMK 15/PMK.06/2021 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan Mekanisme *Crash Program* Tahun Anggaran 2021.
- c. PNBPN Lelang, Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang pada tahun 2021 bersumber dari PNBPN Aset, PNBPN PN, dan PNBPN Lelang dengan target 100%. Total realisasi yang dapat dicapai adalah sebesar 127,41 sehingga persentase capaian kinerja 127,41% (indeks tanpa batas) dari target dengan status capaian HIJAU. Persentase capaian kinerja ini mengalami kenaikan yang sangat signifikan dibandingkan pada tahun 2020.

Tabel 1.2  
Capaian Persentase penerimaan Negara dari pengelolaan kekayaan Negara dan lelang

Kode IKU	Uraian IKU	Uraian	Target 2021	Realisasi 2021	Persentase (%)
1b-CP	Persentase penerimaan Negara dari pengelolaan kekayaan Negara dan lelang	PNBPN Aset	Rp. 2.800.000.000,- (100%)	Rp. 3.603.114.982,- (128,68%)	120%
		PNBPN PN (Addendum)	Rp. 35.700.000,-	Rp. 36.523.612,63 (127,41%)	
		PNBPN Lelang	Rp. 1.390.000.000,-	Rp. 1.744.683.941,-	

➤ **Indikator Kinerja Utama 1.3 : Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara (Saldo PNDS sd 2017)**

IKU Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara (Saldo PNDS sd 2017) pada tahun 2021 menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari penagihan piutang negara. Tingkat Penurunan Outstanding Piutang Negara ini diperoleh dari angsuran dan pelunasan hutang oleh debitur, penerbitan produk hukum berupa Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT), dan Surat Pengembalian Pengurusan Piutang Negara (SKPPN) untuk BKPN yang penerbitan SP3N-nya sampai tanggal 31 Desember 2017 dengan target sebesar Rp 73.000.000,00 (setelah diaddendum) dan realisasi capaian kinerja mencapai Rp. 103.303.180,06 sehingga persentase capaian kinerja sebesar 141,51% sehingga IKU tercapai dengan status capaian HIJAU.

Tabel 1.3  
Capaian Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara (Saldo PNDS sd 2017)

Kode IKU	Uraian IKU	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Persentase (%)
1c-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara (Saldo PNDS sd 2017)	Rp. 38.917.979,56 (3,08% dari outstanding)	Rp. 73.000.000 (Addendum)	Rp. 103.303.180,06	141,51%

## 2. Sasaran Strategis (SS) 2 : Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

### ➤ Indikator Kinerja Utama 2.1 : Indeks Ketepatan Waktu Layanan Kekayaan Negara dan Lelang

Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan kekayaan negara dan lelang pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 88 dengan realisasi mencapai 99,30 sehingga persentase capaian kinerja sebesar 112,84% dengan status capaian HIJAU. Pencapaian ini mengalami peningkatan dari pencapaian tahun 2020 yaitu sebesar 0,83%.

Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan kekayaan negara dan lelang diperoleh dari hasil pemantauan atas ketepatan waktu pada 13 layanan yang menjadi objek pengendalian internal, secara rinci sebagai berikut:

- a. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara
  - Persetujuan/Penolakan Permohonan Sewa BMN Berupa Tanah dan/atau Bangunan (Integrasi Layanan) pada KPKNL
  - Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan pada KPKNL
  - Persetujuan/Penolakan Penjualan BMN Selain Tanah dan/atau Bangunan pada KPKNL
- b. Seksi Piutang Negara
  - Pelayanan Permohonan Keringanan Utang pada KPKNL
  - Pelayanan Permohonan Penebusan Barang Jaminan Senilai/di Atas Nilai Pengikatan
  - Penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas
  - Penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Selesai
- c. Seksi Pelayanan Lelang
  - Penetapan Jadwal Lelang
  - Pelayanan Pemberian Kutipan Risalah Lelang dan Dokumen Kepemilikan Barang
- d. Seksi Hukum dan Informasi
  - Pelayanan Pengembalian Uang Jaminan Penawaran Lelang
  - Pelayanan Pemberian Kuitansi Pembayaran Harga Lelang
  - Penyetoran Hasil Bersih Lelang (Kas Negara)
  - Penyetoran Hasil Bersih Lelang (selain Kas Negara)

Tabel 2.1

Capaian Indeks Ketepatan Waktu penyelesaian layanan kekayaan Negara dan lelang

Kode IKU	Uraian IKU	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Persentase (%)
2a-CP	Indeks Ketepatan Waktu penyelesaian layanan kekayaan Negara dan lelang	98,75	88	99.30	112,84

### ➤ Indikator Kinerja Utama 2.2 : Persentase Realisasi Pokok Lelang

Pokok Lelang adalah Barga Lelang yang belum termasuk Bea Lelang Pembeli dalam Lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif, atau Barga Lelang dikurangi Bea Lelang Pembeli dalam Lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif. Harga Lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh Peserta Lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh Pejabat Lelang.

IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang pada tahun 2021 berasal dari pokok lelang Pejabat Lelang Kelas I dan Pokok Lelang Pegadaian yang ditargetkan sebesar Rp. 41.000.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 67.844.069.041 dengan persentase capaian kinerja 165.47% dengan status capaian HIJAU. Tercapainya target persentase hasil lelang (pokok lelang) sebagian besar merupakan hasil dari pelaksanaan lelang Pegadaian sebesar 82.75% dari target yang ditetapkan.

Tabel 2.2  
Capaian Persentase Realisasi Pokok Lelang

Kode IKU	Uraian IKU		Target 2021	Realisasi 2021	Persentase (%)
2b-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	Pokok Kelas I	Rp. 18.000.000.000	Rp. 17.462.011.141	120.00
		Pokok Pegadaian	Rp. 23.000.000.000	Rp. 50.382.057.900	

### 3. Sasaran Strategis (SS) 3 : Birokraasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien

#### ➤ Indikator Kinerja Utama 3.1 : Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL

IKU Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL merupakan IKU yang mendukung terciptanya *good governance* dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan dengan melibatkan partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan melalui survei kepuasan. Perhitungan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL) KPKNL Padangsidimpuan tahun 2021 diperoleh dari hasil pengolahan data atas penilaian yang diberikan oleh 69 (enam puluh sembilan) pengguna layanan pengelolaan kekayaan negara, layanan penilaian, layanan lelang, dan layanan piutang Negara sebagaimana tabel berikut:

Pengelolaan Kekayaan Negara	4,80
Layanan Penilaian	4,90
Lelang	4,76
Piutang Negara	4,75

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 4,75 dan realisasi sebesar 4,80 dengan persentase capaian sebesar 101,05% dengan status capaian HIJAU. Realisasi Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL ini sudah mengalami kenaikan selama 3 tahun berturut turut dan pada tahun 2021 ini mengalami kenaikan sebesar 0,02 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020.

Nilai IKPL KPKNL Padangsidimpuan tahun 2021 sebesar 4,80 (skala 5) yang menandakan bahwa pengguna layanan puas (cenderung mengarah ke sangat puas) dengan layanan KPKNL Padangsidimpuan. Secara umum pengguna layanan mengapresiasi layanan yang diberikan, mengharapkan kualitas layanan KPKNL Padangsidimpuan tetap dapat ditingkatkan, dan mengharapkan agar pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis dapat dilakukan dengan rutin. Peningkatan nilai IKPL tidak terlepas dari upaya peningkatan kualitas layanan yang diberikan. Sejalan dengan pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi tahun 2021, KPKNL Padangsidimpuan berupaya meningkatkan pelayanan pada pengguna antara lain melalui penyempurnaan Area Pelayanan Terpadu serta penyediaan akses informasi berupa persyaratan layanan dan SOP proses bisnis yang mudah dan dapat dijangkau kapan pun oleh setiap pengguna layanan (<https://linktr.ee/kioskpknl>). Untuk memudahkan pengguna layanan yang tidak dapat datang secara langsung ke KPKNL, disediakan opsi layanan konsultasi virtual melalui pesan *Whatsapp* dan *zoom meeting*.

Tabel 3.1  
Capaian Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL

Kode IKU	Uraian IKU	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Persentase (%)
2a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL	4,78	4.75	4.80	101.05%

#### 4. Sasaran Strategis (SS) 4 : Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif

##### ➤ Indikator Kinerja Utama 4.1 : Persentase Bidang Tanah BMN yang disertifikatkan

Pelaksanaan sertipikasi tanah BMN merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Penswertipikatan BMN berupa Tanah, dengan tugas/kewajiban masing-masing pihak sebagai berikut:

- a. Kendali BPN:
  - 1) Melaksanakan penswertipikatan BMN;
  - 2) Rekapitulasi data BMN berupa tanah yang telah disertipikatkan
- b. Kendali K/L
  - 1) Inventarisasi dan identifikasi BMN belum bersertifikat beserta permasalahannya;
  - 2) Melengkapi persyaratan penswertipikatan BMN;
  - 3) Menunjukkan letak dan tanda batas tanah;
  - 4) Menyampaikan rekapitulasi data yang akan disertipikatkan;
  - 5) Mengajukan permohonan sertifikasi;
  - 6) Menyusun dan mengajukan anggaran sertifikasi;
  - 7) Mengajukan permohonan penetapan status penggunaan BMN, paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya sertipikat.
- c. Kendali Kemenkeu:
  - 1) Menyimpan asli sertipikat;
  - 2) Updating data BMN yang akan disertipikatkan;
  - 3) Permintaan data BMN bersertipikat kepada BPN;
  - 4) Pengalokasian anggaran sertifikasi

Pelaksanaan sertifikasi BMN berupa tanah terdiri dari tahapan:

- 1) Permintaan kepada K/L mengenai jumlah BMN yang sudah bersertifikat dan belum bersertifikat
- 2) Identifikasi BMN berupa tanah yang belum memiliki sertifikat. Identifikasi dilakukan dengan memetakan tanah belum bersertifikat pada K/L berdasarkan lokasi, luas tanah, nilai BMN dan nama pemilik
- 3) Penyusunan data BMN belum bersertifikat yang diperkirakan dapat disertifikatkan
- 4) K/L melakukan pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan sertifikasi untuk BMN yang tidak memiliki permasalahan
- 5) Penyampaian rekomendasi BMN berupa tanah berstatus clean and clear (dokumen persyaratan sertifikasi lengkap dan tidak memiliki permasalahan) kepada BPN untuk disertifikatkan
- 6) Pelaksanaan sertifikasi oleh BPN c.q. Kantor Pertanahan.

Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan pada tahun 2021 ditargetkan sebanyak 100% dengan realisasi sebesar 126,5% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 120% (indeks tanpa batas) dengan status capaian HIJAU. Meskipun pada pelaksanaannya terdapat bidang tanah yang tidak dapat dilakukan pensertipikatan sehingga perlu dilakukan perubahan target, namun KPKNL Padangsidempuan berhasil mensertipikatkan bidang tanah melampaui dari target yang ditetapkan. Keberhasilan tersebut didapatkan karena koordinasi dan kerjasama yang baik antara KPKNL Padangsidempuan dengan satuan kerja pemohon serta Kantor Pertanahan terkait. Semua pihak yang terlibat juga telah berkomitmen untuk melakukan upaya yang terbaik sehingga pada akhir bulan Oktober terdapat bidang tanah yang ditambahkan untuk disertipikatkan diluar target nominatif. IKU ini mengalami peningkatan persentase sebesar 18,63% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020.

Tabel 4.1  
Capaian Persentase Bidang Tanah BMN yang disertifikatkan

Kode IKU	Uraian IKU	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Persentase (%)
4a-CP	Persentase Bidang Tanah BMN yang disertifikatkan	74 Bidang Tanah 101,37%	400 Bidang Tanah 100%	506 Bidang Tanah 126.50%	120.00

➤ **Indikator Kinerja Utama 4.2 : Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)**

Evaluasi kinerja BMN merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis.

Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (Portofolio Aset) mencapai realisasi sebesar 123,88% dari 100% yang ditargetkan sehingga persentase capaian kinerja sebesar 120% dengan status capaian HIJAU. Peningkatan persentase capaian terjadi sejalan dengan peningkatan jumlah realisasi pengukuran dalam implementasi evaluasi kinerja BMN.

Tabel 4.2  
Capaian Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

Kode IKU	Uraian IKU	Realisasi 2019	Target 2021	Realisasi 2021	Persentase (%)
4b-CP	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	122,22% (22)	100% (67)	123.88% (83)	120.00

➤ **Indikator Kinerja Utama 4.3 : Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian**

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Ruang lingkup hasil penilaian yang diukur adalah hasil penilaian dalam rangka pemindahtanganan dan pemanfaatan yang digunakan dalam Persetujuan. Objek penilaian meliputi Barang Milik Negara (BMN). Nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan merupakan nilai yang menjadi basis/dasar perhitungan dalam pemberian persetujuan/penolakan pemanfaatan/ pemindahtanganan BMN oleh Pengelola Barang. Jika terdapat persetujuan yang nilainya telah diberikan faktor penyesuaian oleh Pengelola Barang berdasarkan peraturan atau kebijakan dengan dasar nilai penghitungan yang dipakai adalah hasil penilaian maka nilai ketergunaan nya adalah 100% dan deviasinya 0%.

Deviasi ketergunaan hasil penilaian dilakukan untuk mengukur selisih antara nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dibandingkan dengan nilai hasil penilaian yang disampaikan kepada Pengelola Barang terhadap objek BMN yang sama. Perhitungan deviasi dilakukan terhadap setiap persetujuan yang objeknya dimintakan penilaian. Capaian deviasi ketergunaan hasil penilaian adalah rata-rata dari jumlah deviasi dari tiap-tiap persetujuan yang ditetapkan Pengelola Barang yang objeknya dimintakan penilaian.

Realisasi IKU Deviasi Ketergunaan hasil Penilaian adalah sebesar 3,79% dari target sebesar 22% (minimized) dengan persentase sebesar 120% dengan status capaian kinerja HIJAU. IKU ini menjadi perhatian oleh Pejabat Fungsional Pemerintah dan Penilai yang terlibat untuk dapat mencapai target minimized dari target yang ditetapkan dengan upaya untuk tetap menjaga kualitas penilaian.

Tabel 4.3  
Capaian Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian

Kode IKU	Uraian IKU	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Persentase (%)
4c-CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	1,34%	22% ( <i>minimized</i> )	3.79%	120%

## 5. Sasaran Strategis (SS) 5 : Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif

### ➤ Indikator Kinerja Utama 5.1 : Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN

Persentase efektivitas penyelesaian BKPN pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 25 berkas (dengan bobot bernilai 1 untuk BKPN yang dinyatakan selesai), yang dapat dicapai dengan penerbitan Produk Hukum Piutang Negara yang menyatakan pengurusan BKPN dinyatakan selesai, diantaranya penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Dinyatakan Lunas (SPPNL); PSBDT ataupun SKPPN. Adapun realisasi yang dicapai sebesar 25 berkas sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100% dengan status capaian HIJAU.

Tabel 5.1  
Capaian Persentase Efektivitas penyelesaian BKPN

Kode IKU	Uraian IKU	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Persentase (%)
5a-CP	Persentase Efektivitas penyelesaian BKPN	123,91% (15 berkas kategori I dan 6 berkas kategori II)	25 berkas (pembobotan per berkas = 1) (100%)	25 (100%)	100%

### ➤ Indikator Kinerja Utama 5.2 : Persentase Produktivitas Lelang

Produktivitas lelang dinilai dari seberapa seberapa intensitas frekuensi lelang yang laku. Apabila dalam satu frekuensi lelang terdapat lot barang yang laku dan tidak laku, maka tetap diperhitungkan sebagai sebagai satu frekuensi lelang laku.

Persentase produktivitas lelang ditetapkan targetnya sebesar 35% dan mencapai realisasi sebesar 44,50% atau persentasenya mencapai 120% dengan status capaian HIJAU. Pencapaian ini apabila dibandingkan dengan pencapaian pada tahun sebelumnya mengalami peningkatan sebesar 7,87%.

Tabel 5.2  
Capaian Persentase Produktivitas Lelang

Kode IKU	Uraian IKU		Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021		Persentase (%)
5b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	Frekuensi Lelang	37,59%	35.00%	364	46.13%	120.00
		Lelang Laku			168		

➤ **Indikator Kinerja Utama 5.3 : Persentase Pelaksanaan Lelang E-auction dan E-conventional auction**

*E-auction* adalah pelaksanaan lelang oleh KPKNL yang memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) berbasis internet. *E-auction* ini terdiri dari 2 jenis, yaitu ALE (aplikasi lelang melalui email) dan ALI (aplikasi lelang melalui internet sehingga lebih real time dan terbuka). Pemanfaatan TIK berbasis internet ini diharapkan dapat menghasilkan lelang yang lebih optimal dan transparan. Hal ini dikarenakan *e-auction* dapat menjaring peserta lebih luas serta peserta tidak diwajibkan hadir di tempat pelaksanaan lelang sehingga dapat meminimalisasi terjadinya pengaturan harga lelang.

Implementasi *e-auction* meliputi:

- 1) Pelaksanaan Lelang *E-Auction* adalah lelang tanpa kehadiran peserta lelang;
- 2) E-Conventional Auction adalah lelang dengan kehadiran peserta lelang yang memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi dalam pengelolaan infrastruktur pendukung lelang (pembayaran uang jaminan menggunakan Virtual Account).

Persentase pelaksanaan lelang E-auction dan E-conventional auction tahun 2021 ditargetkan sebesar 92% dan mencapai realisasi 100% atau sebesar 108,70% (indeks tanpa batas) dengan status capaian HIJAU. Realisasi capaian ini tidak mengalami perubahan dari tahun 2020 yaitu sama-sama mencapai realisasi 100% dari target yang ditetapkan.

Tabel 5.3  
Capaian Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction

Kode IKU	Uraian IKU	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Persentase (%)
5c-CP	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	100%	92%	100%	108.70

➤ **Indikator Kinerja Utama 5.4 : Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN**

PNBP Fungsional DJKN merupakan Jenis PNBPN DJKN yang tercantum pada DIPA BA 015 DJKN yang terdiri dari PNBPN yang berasal dari Biaya Administasi (Biad) Pengurusan Piutang Negara dengan MAP: 425785 dan Bea Lelang dengan 425782, 425784 (Pejabat Lelang Kelas I dan Pegadaian).

Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN, diukur dari:

- 1) Selisih antara pembukuan PNBPN MAP 425785 pada aplikasi Focus PN dengan PNBPN pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi
- 2) Selisih antara pembukuan PNBPN MAP 425782 dan 425784 pada aplikasi Dropbox/Aplikasi lain Khusus Lelang dengan PNBPN pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.

Target Deviasi PNBPN dari PNBPN Lelang maksimal 10% dan capaian deviasi pada tahun 2021 adalah sebesar 0.00% yang artinya tidak ada selisih antara aplikasi OMSPAN dan Dropbox pada tahun 2021.

Target Deviasi PNBPN dari Biad PPN maksimal 15% dan realisasi adalah sebagai berikut :

- a. Pembukuan Biad PPN pada aplikasi Focus PN = Rp 36.523.612,63  
 b. Pembukuan Biad PPN pada aplikasi OMSPAN/KPPN = Rp 36.523.755,00  
 Sehingga terdapat perbedaan/deviasi sebesar Rp 142,37 (Persentase kisaran 0%) yang berasal dari salah satu debitur yang menyetor lebih sejumlah nominal yang disebutkan, sehingga kelebihan tersebut disetorkan ke kas negara.

Tabel 5.4  
 Capaian Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN

Kode IKU	Uraian IKU	Target 2021	Realisasi 2021	Persentase (%)
5d-CP	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	12.50%	0.00%	120%

## 6. Sasaran Strategis (SS) 6 : Edukasi yang Efektif

### ➤ Indikator Kinerja Utama 6.1 : Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi

Edukasi merupakan kegiatan pembinaan, bimbingan teknis, pemberian masukan, konsultasi, atau arahan yang dilaksanakan dalam lingkup internal maupun eksternal. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman atas proses bisnis yang harus dilakukan baik oleh pihak internal maupun eksternal sehingga output yang ditetapkan dalam suatu pekerjaan dapat tercapai. Ruang lingkup edukasi adalah:

- 1) Edukasi internal dari atasan/unit superintenden kepada bawahan/unit yang diawasi, dan
- 2) Edukasi eksternal dari kantor wilayah/KPKNL kepada pengguna layanan/masyarakat umum.

Materi edukasi adalah terkait dengan pengelolaan barang milik negara, kekayaan negara lain-lain, kekayaan negara dipisahkan, pengurusan piutang negara, dan lelang. Edukasi dapat dikatakan efektif apabila pihak yang diedukasi memberikan feedback yang positif atas tingkat pemahaman materi dan proses edukasi yang telah dilakukan.

Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi pada tahun 2021 ditetapkan sebesar 89. Realisasi mencapai 93,22 atau sebesar 104.74% dengan status capaian HIJAU. Realisasi tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 3,36% dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2020. Peningkatan ini didukung oleh peningkatan kualitas edukasi meliputi materi, metode, dan narasumber sehingga sasaran dan tujuan edukasi dan komunikasi dapat tercapai.

Tabel 6.1  
 Capaian Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi

Kode IKU	Uraian IKU	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Persentase (%)
6a-N	Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi	90,23	89	93.22	104.74

## 7. Sasaran Strategis (SS) 7 : Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif

### ➤ Indikator Kinerja Utama 7.1: Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara

Pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN meliputi kegiatan pemantauan atas pengelolaan BMN pada K/L terutama terkait aspek utilisasi-nya. IKU ini difokuskan pada

pemantauan utilisasi berupa pemanfaatan dan pemindahtanganan. Objek yang dipantau adalah tindak lanjut atas surat persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang telah diterbitkan oleh DJKN selaku pengelola barang.

Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan asset pada KPKNL Padangsidimpuan tahun 2021 mencapai 91,38% dari target yang ditetapkan 85% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 120% dengan status capaian HIJAU. IKU ini jika dibandingkan pencapaiannya dengan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 5,17%. Hal ini terjadi akibat adanya beberapa produk Persetujuan Penjualan dan Pemanfaatan yang tidak ditindaklanjuti oleh pihak ketiga.

Tabel 7.1  
Capaian Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan asset

Kode IKU	Uraian IKU		Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021		Persentase (%)
9a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan asset	Persetujuan/ Penetapan Sm II 2019 yang ditindaklanjuti K/L	96,55%	85%	28	91.38%	107.51
		Persetujuan/ Penetapan Sm II 2019 yang diterbitkan			29		
		Persetujuan/ Penetapan Sm I 2020 yang ditindaklanjuti K/L			25		
		Persetujuan/ Penetapan Sm I 2020 yang diterbitkan			29		

## 8. Sasaran Strategis (SS) 8 : SDM yang kompeten

### ➤ Indikator Kinerja Utama 8.1 : Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai

Mengukur persentase banyaknya pegawai (bawahannya) yang telah memenuhi standar pengembangan pegawai dan telah sesuai dengan perencanaan pengembangannya. Bawahan telah memenuhi kriteria bila memenuhi minimal 24 JP, serta minimal 1 dari usulan rencana Pengembangan Kompetensi pada modul DKI telah dilaksanakan.

Standar jamlat adalah jumlah minimal jam pelatihan yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai dalam waktu satu tahun yaitu 24 jam pelatihan (JP). 1 jamlat adalah 45 menit. Jenis Pengembangan kompetensi yang dapat dilakukan pegawai mengacu pada Peraturan terkait Pengembangan kompetensi Pegawai Tercantum dalam PMK 216 Tahun 2018 tentang Manajemen Pengembangan SDM di lingkungan Kementerian Keuangan. Pemenuhan Pengembangan kompetensi pegawai dilakukan berdasarkan dengan Pengembangan Kompetensi yang telah direncanakan dan diusulkan pada usulan diklat pada modul DKI. Perencanaan Pengembangan Kompetensi pegawai berdasarkan usulan *training* dengan berdasar kesepakatan pegawai dengan atasannya.

Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai pada KPKNL Padangsidimpuan pada tahun 2021 mencapai 120% dari target sebesar 100% atau status capaian kinerja HIJAU. Efek Pandemi Covid-19 masih dirasakan pada tahun 2021 mengakibatkan kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai dilakukan dalam bentuk Pelatihan Jarak Jauh (PJJ) dan E-learning sebagai metode pembelajaran mandiri bagi pegawai. Pada tahun 2020 metode pembelajaran dalam bentuk PJJ adalah adalah jenis pelatihan yang baru yang belum pernah dilaksanakan sebelumnya tetapi pada tahun 2021 banyak pegawai yang berminat untuk mengikuti PJJ hal

ini karena selain dapat menambah ilmu pengetahuan sebagai penunjang pekerjaan juga dapat menyelesaikan pekerjaan didalam kantor dengan lancar dan tepat waktu.

Tabel 8.1  
Capaian Persentase pengembangan kompetensi pegawai

Kode IKU	Uraian IKU		Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Persentase (%)
8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	Jumlah pegawai memenuhi kriteria 24 JP	120%	100%	120%	120%
		Jumlah pegawai melebihi kriteria 24 JP				

## 9. Sasaran Strategis (SS) 9 : Organisasi yang *fit for purpose*

### ➤ Indikator Kinerja Utama 9.1 : Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI menuju WBK/WBBM

Salah satu upaya strategis dalam pencegahan korupsi adalah dengan membangun Wilayah Bebas dari Korupsi – Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) yang berbasis integritas di lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda). Pencapaian WBK/WBBM merupakan tujuan utama dari pembangunan Zona Integritas pada K/L dengan menggunakan parameter dan instrumen sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan PermenPAN-RB Nomor 10 Tahun 2019.

Menindaklanjuti PermenPAN-RB 52/2014 sebagaimana telah diubah dengan PermenPAN-RB Nomor 10 Tahun 2019, akan dilakukan seleksi internal unit kerja yang memenuhi kriteria WBK/WBBM yang dapat direkomendasikan untuk diajukan kepada KemenPAN-RB untuk dilakukan penilaian secara nasional. Predikat ZI menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, dengan nilai komponen pengungkit minimal 75, indikator terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN dengan nilai minimal 18,5 yang terdiri dari sub komponen survei persepsi anti korupsi minimal 13,5 dan sub komponen persentasi TLHP minimal 5, serta indikator terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat minimal 16.

KPKNL Padangsidempuan terpilih menjadi salah satu unit kerja DJKN yang mengikuti penilaian Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI WBK). Pembangunan ZI WBK merupakan komitmen KPKNL Padangsidempuan untuk melaksanakan reformasi birokrasi, mencegah adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan. Unit kerja dinyatakan lulus ZI WBK jika telah memperoleh nilai minimal 75,00 (terdiri dari komponen pemenuhan dokumen terkait dan nilai persepsi masyarakat). Berdasarkan penilaian Tim Penilai Kementerian Keuangan, KPKNL Padangsidempuan memperoleh nilai capaian sebesar 98,28.

Pada bulan Desember 2021, KPKNL Padangsidimpuan menjadi salah satu unit kerja yang berhasil meraih predikat ZI WBK berdasarkan penilaian akhir oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Tabel 9.1  
Capaian Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI menuju WBK/WBBM

Kode IKU	Uraian IKU	Target 2021	Realisasi 2021	Persentase (%)
9a-N	Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI menuju WBK/WBBM	75	98.28	120

➤ **Indikator Kinerja Utama 9.2 : Nilai Hasil Reviu Pengelolaan Kinerja**

Reviu Pengelolaan Kinerja diselenggarakan dalam rangka memberikan *quality assurance* atas sistem manajemen kinerja KPKNL Padangsidimpuan. Reviu ini dilakukan atas 4 aspek penilaian, yaitu perencanaan (*Refinement IKU* tahun berikutnya dan *Resource Forum* perencanaan kinerja dan anggaran), pelaksanaan/eksekusi (penyusunan dan penetapan kontrak kinerja seluruh pegawai), monitoring dan evaluasi (pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi, penyampaian capaian kinerja oleh masing-masing seksi/subbagian, matriks tindak lanjut rencana aksi), serta edukasi pengelolaan kinerja (internalisasi pengelolaan kinerja kepada pegawai dan melalui media sosial). Pelaksanaan Reviu Pengelolaan Kinerja KPKNL Padangsidimpuan dilakukan oleh Kanwil DJKN Sumatera Utara.

Realisasi nilai Hasil Reviu Pengelolaan Kinerja pada KPKNL Padangsidimpuan pada tahun 2021 mencapai 99,75 dari target yang ditetapkan sebesar 75,00 yang apabila dibandingkan pada pencapaian tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 16,29 poin. Peningkatan cukup signifikan ini antara lain diperoleh melalui upaya perbaikan kualitas pengelolaan kinerja dengan pelaksanaan *refinement IKU* dan *resource forum* anggaran yang pada tahun sebelumnya belum terdokumentasi dengan baik, peningkatan keterlibatan seluruh pegawai dalam penyusunan IKU dan manual IKU, serta didukung juga dengan penggunaan *e-performance* dalam manajemen kinerja.

Tabel 9.2  
Capaian Nilai Hasil Reviu Pengelolaan Kinerja

Kode IKU	Uraian IKU	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Persentase (%)
9b-N	Nilai Hasil Reviu Pengelolaan Kinerja	83,46	75.00	99.75	120

➤ **Indikator Kinerja Utama 9.3 : Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator**

Tingkat efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator merupakan instrumen penilaian untuk mengukur keaktifan Pejabat Administrator dalam melakukan komunikasi internal melalui FGD kepada pegawai di lingkungannya termasuk mengukur mengenai feedback peserta terhadap kegiatan FGD yang dilaksanakan. Parameter yang diukur berdasarkan beberapa aspek yaitu *delivery* (cara penyampaian materi oleh Pejabat Administrator), *understanding* (pemahaman peserta terhadap materi FGD), *learning enthusiasm* (antusiasme pegawai terhadap kegiatan FGD), *contribution to learning* (dampak kegiatan FGD kepada peningkatan kapasitas pegawai).

Mekanisme pengukuran efektivitas dilakukan melalui kuesioner yang dikoordinir oleh Setjen (CTO). Kegiatan FGD dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan terkait Pelaksanaan Forum Group Discussion. Fokus materi FGD akan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal melalui surat Kepala Biro SDM atas nama Sekretaris Jenderal kepada

Sekretaris Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Selain terkait kode etik, akan terdapat tema lain dalam pelaksanaan FGD. Pengukuran efektivitas pelaksanaan FGD untuk seluruh tema yang ditetapkan oleh Setjen mengacu pada manual IKU ini.

Realisasi Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator pada KPKNL Padangsidimpuan tahun 2021 mencapai 96,14 dari target yang ditetapkan sebesar 80 sehingga persentase capaian kinerja adalah sebesar 120% (indeks tanpa batas) dengan status capaian HIJAU. IKU ini merupakan IKU yang baru yang belum pernah ada di tahun-tahun sebelumnya. Dalam mencapai target IKU ini tidak ditemukan kendala yang berarti.

Tabel 9.3  
Capaian Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator

Kode IKU	Uraian IKU	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Persentase (%)
11c-N	Indeks efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	96.14%	80	99.48	120.00%

## 10. Sasaran Strategis (SS) 10 : Pengelolaan Keuangan yang Optimal

### ➤ Indikator Kinerja Utama 10.1 : Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Unsur yang diukur terdiri dari 2 komponen penilaian yaitu komponen hasil dan komponen proses. Komponen hasil dinilai dari 4 indikator yaitu capaian keluaran, efisiensi, konsistensi, dan penyerapan anggaran atas pagu netto, sedangkan komponen proses dinilai dari 10 indikator yaitu penyelesaian tagihan, data kontrak, pengelolaan UP, perencanaan kas, rekon LPJ Bendahara, pengembalian SPM, retur SP2D, retur DIPA, pagu minus, dan dispensasi SPM.

Persentase kualitas pelaksanaan anggaran pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 95,50% dengan realisasi Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA) mencapai 97% dan nilai SMART DJA mencapai 93,41% dimana untuk pembobotan Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (PKPA) terdiri dari komposisi 40% nilai IKPA dan 60% nilai SMART sehingga secara akumulasi untuk Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran tercapai 94,85% atau secara persentase mencapai 99,32% dari target dengan status capaian KUNING.

Tabel 10.1  
Capaian Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Kode IKU	Uraian IKU	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Persentase%
10a-CP	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	99.12%	95.50%	94,85%	99,32%

## B. Realisasi Anggaran

### 1. Realisasi Anggaran

Sebagaimana diuraikan dalam Peta Strategis KPKNL Padangsidimpuan yang terdiri dari 20 sasaran strategis, salah satunya adalah sasaran strategis terkait Pengelolaan Keuangan dan BMN yang optimal dengan indikator kinerja utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran.

Adapun nilai jumlah anggaran KPKNL Padangsidempuan (setelah refocusing ke-4) TA 2021 adalah sebesar Rp2.077.908.00,- (dua milyar tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus delapan ribu rupiah), dengan persentase realisasi anggaran TA 2021 sebesar 94,62% atau sejumlah Rp1.966.195.366,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh enam juta seratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah). Berikut terlampir rincian realisasi penyerapan anggaran pada tahun 2021:

Kegiatan		Anggaran	Realisasi	Persentase Realisasi Anggaran (%)	Sisa Anggaran
4796.BMB.001	Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara	Rp100.000,-	Rp0,-	0	Rp100.000,-
4796.BMB.002	Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang	Rp 120.000,-	Rp0,-	0	Rp120.000,-
4798.AAH.001	Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	Rp42.020.000,-	Rp40.596.000,-	96.61	Rp1.424.000,-
4798.AAH.002	Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara	Rp5.488.000,-	Rp4.824.000,-	87.90	Rp664.000,-
4798.AAH.003	Risalah Lelang	Rp32.100.000,-	Rp29.786.000,-	92.79	Rp2.314.000,-
4798.FAE.001	Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan (PU)	Rp13.216.000,-	Rp13.160.800,-	99.58	Rp55.200,-
4798.FAE.003	Rekomendasi Hasil Kajian Portofolio Aset dan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK)	Rp36.336.000,-	Rp30.520.000,-	83.99	Rp5.816.000,-
4798.FAE.005	Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara	Rp8.772.000,-	Rp6.582.000,-	75.03	Rp2.190.000,-
4798.FAE.006	Rekomendasi Hasil Penilaian	Rp7.026.000,-	Rp4.500.000,-	64.05	Rp2.526.000,-
4700.EAG.001	Advokasi Hukum	Rp13.358.000,-	Rp11.239.000,-	84.14	Rp2.118.100,-
4701.EAC.001	Operasionalisasi Kantor	Rp1.030.195.000,-	Rp1.004.640.667,-	97.52	Rp25.554.333,-
4701.EAC.002	Kerumahaan	Rp114.684.000,-	Rp103.209.593,-	89.99	Rp11.474.407,-
4701.EAD.001	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp122.620.000,-	Rp112.899.099,-	92.07	Rp9.720.901,-
4701.EAD.002	Peralatan Fasilitas Perkantoran	Rp90.178.000,-	Rp90.176.724,-	100	Rp1.276,-
4701.EAE.001	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp107.521.000,-	Rp84.722.000,-	78.80	Rp22.799.000,-
4701.EAE.002	Gedung/Bangunan	Rp442.034.000,-	Rp419.949.583,-	95	Rp22.084.417,-
4702.BMB.003	Publikasi	Rp5.680.000,-	Rp5.103.000,-	89.84	Rp577.000,-
4704.EAK.001	Rekomendasi Kepatuhan Internal	Rp6.460.000,-	Rp4.286.000,-	66.35	Rp2.174.000,-
		Rp2.077.908.000,-	Rp1.966.195.366,-	94.62	Rp111.712.634,-

## 2. Realisasi PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak)

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada KPKNL Padangsidempuan tahun 2021 berasal dari pendapatan biaya administrasi pengurusan piutang negara, pendapatan bea lelang, dan pendapatan bea lelang pegadaian. Realisasi PNB pada KPKNL Padangsidempuan Tahun 2021 dapat digambarkan pada tabel berikut ini:

No.	Uraian	Realisasi
1	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	Rp36.523.612,63
2	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	Rp. 737.042.783,-
3	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	Rp. 1.007.641.158
<b>Jumlah</b>		Rp. 1.781.207.553,63

-----o0o-----

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Pencapaian**

Capaian Kinerja Organisasi KPKNL Padangsidempuan pada tahun 2021 secara umum hampir memenuhi seluruh target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan. Keberhasilan KPKNL Padangsidempuan terlihat dari kemampuan untuk memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan selama tahun anggaran 2021 dengan NKO mencapai 102,41%. Jumlah IKU pada tahun 2021 sama dengan tahun 2020 yang ditetapkan diantaranya ada 19 IKU yang mencapai status capaian HIJAU dan 1 IKU yang mendapatkan status capaian KUNING yaitu Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dengan realisasi 86,24%. Adapun 20 jenis IKU tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK
2. Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang
3. Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara (Saldo PNDS sd 2017)
4. Indeks Ketepatan Waktu Layanan Kekayaan Negara dan Lelang
5. Persentase Realisasi Pokok Lelang
6. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL
7. Persentase Bidang Tanah BMN yang disertipikatkan
8. Persentase Impelentasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)
9. Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian
10. Persentase Efektivitas Penyelesaian BKP
11. Persentase Produktivitas Lelang
12. Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Convention Auction
13. Deviasi Data PNBFP Fungsional DJKN
14. Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi
15. Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Negara
16. Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai
17. Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI menuju WBK/WBBM
18. Nilai Hasil Review Pengelolaan Kinerja
19. Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator
20. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Adapun capaian kinerja lainnya yang diraih KPKNL Padangsidempuan pada tahun 2021 ada 2 yaitu Penghargaan dalam partisipasi mengikuti Lomba Pengelolaan Arsip Unit Vertikal DJKN Tahun 2021 yang diselenggarakan DJKN dan Penghargaan unit kerja yang telah meraih Predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun Anggaran 2021 yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

### **B. Permasalahan dan Kendala Tahun 2021**

Terdapat beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi KPKNL Padangsidempuan meskipun dapat memenuhi hampir seluruh target dengan status capaian HIJAU, yaitu :

1. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran, yang tidak mencapai target realisasi yang disebabkan realisasi/penyerapan yang tidak sesuai dengan target penyerapan untuk triwulan I dan triwulan II TA 2021.
2. Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung sehingga membatasi beberapa kegiatan Pengurusan Piutang Negara seperti penagihan langsung kepada debitur.
3. Kualitas BKP yang tidak begitu baik.

4. Semakin sedikit debitur yang berpotensi untuk dilakukan penagihan, sedangkan belum ada penyerahan baru yang berpotensi untuk mendongkrak capaian IKU PNBPN Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara serta Piutang Negara Dapat Diselesaikan (PNDS).
5. SKPT yang tidak bisa terbit sampai pada saat hari H lelang yang disebabkan kurangnya respons dari pihak Kantor Pertanahan terhadap objek lelang yang belum valid data tanahnya pada Sistem Layanan Pertanahan Elektronik.
6. Semakin meningkatnya frekuensi pembeli lelang yang wanprestasi atau peserta lelang yang terpilih sebagai pemenang lelang tetapi tidak melunasi uang hasil lelang. terhadap pembeli lelang wanprestasi ini tidak dikenakan sanksi melalui sistem yg telah ada dalam [lelang.go.id](http://lelang.go.id) sehingga beberapa beberapa peserta lelang sering hanya ikut lelang dan menawar tetapi tidak mau melunasi. Hal ini diduga karena peserta lelang tersebut mungkin hanya ingin supaya objek lelang tersebut tidak jadi laku atau menunda agar objek lelang tersebut tidak dilelang dalam jangka waktu tertentu karena untuk dilakukan permohonan lelang kembali sampai dengan pelaksanaan lelang masih ada jangka waktu yang cukup lama.
7. Pembagian berkas permohonan lelang kepada masing-masing Pelelang agar berdasarkan prestasi masing-masing, tetapi tidak tertutup kemungkinan diperhatikan juga capaian per kuartal, agar realisasi IKU masing-masing Pelelang dapat dicapai sesuai target yang ditetapkan.
8. Objek lelang kurang *marketable* dan harga masih dirasa tinggi sehingga mengurangi daya laku lelang.
9. Hilangnya potensi penerimaan negara dari pokok lelang menyebabkan target pokok lelang belum memenuhi target.
10. Walaupun capaian deviasi status hijau atau lebih atau sama dengan 100% tetapi deviasi itu masih terjadi dikarenakan adanya kepentingan satuan kerja untuk mendapatkan PNBPN yang maksimal tanpa mempertimbangkan nilai sewa yang berlaku disekitar dan dikarenakan adanya tarif tertentu untuk penyewa atau penyewa berbadan hukum kopreasi atau penyewa dengan kriteria UMKM;
11. Beberapa usulan limit penjualan/tarif sewa yang diajukan oleh stakeholder tidak mencerminkan kondisi pasar sedangkan nilai yang dihasilkan Penilai adalah nilai wajar yang mencerminkan kondisi pasar.

### C. Strategi Pemecahan Masalah untuk tahun 2022

Langkah-langkah antisipatif yang harus dilakukan oleh KPKNL Padangsidempuan dengan memperhatikan arahan dan kebijakan Kanwil DJKN Sumatera Utara dan Kantor Pusat DJKN serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk menghadapi permasalahan tersebut adalah :

1. Rencana RPD disesuaikan dengan proyeksi masing-masing seksi untuk setiap triwulan agar penyerapan dapat maksimal.
2. Melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan stakeholder terkait (penyerah piutang) dalam pengurusan piutang negara.
3. Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan debitur yang dapat dihubungi untuk dilakukan penagihan, baik secara penagihan langsung di lapangan maupun komunikasi via telepon ataupun media lainnya.
4. Melaksanakan MoU antara DJKN/KANWIL DJKN/KPKNL dengan pihak Kantor Pertanahan dalam rangka penerbitan e-SKPT atau KPKNL dapat berkoordinasi dengan BPN/Kantor Pertanahan terkait penerbitan SKPT yang telah dilaksanakan,
5. Memberikan usulan kepada Kantor Pusat DJKN untuk membuat sistem pada [lelang.go.id](http://lelang.go.id) agar memblokir peserta lelang yang terindikasi sebagai pembeli wanprestasi pada pelaksanaan

lelang sebelumnya atau memberikan jangka waktu pembeli lelang wanprestasi untuk dapat mengikuti sebagai peserta lelang pada lelang berikutnya.

6. Kantor Pusat DJKN membuat kebijakan yang membuat Pelelang bekerja dengan nyaman dan aman berdasarkan prestasi dan tanggungjawab Pelelang sesuai jenjangnya.
7. Meningkatkan frekuensi pelaksanaan sosialisasi dan koordinasi dengan pihak pemohon lelang mengenai prosedur lelang mulai dari pra lelang, saat lelang, dan pasca lelang serta dokumen-dokumen persyaratan baik umum maupun khusus.
8. Memberikan usulan ke kantor pusat agar pembatalan lelang atas permintaan pemohon dapat dijadikan menjadi target capaian IKU (IKU % Pokok Lelang agar dipisah antara lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT dengan Pokok Lelang Eksekusi Barang Yang Dirampas Untuk Negara /Lelang Noneksekusi Wajib/Sukarela, sehingga ada penambahan IKU baru yaitu : IKU Efektifitas Penurunan NPL Perbankan melalui Lelang).
9. Melakukan edukasi dan komunikasi dengan satuan kerja terkait usulan limit penjualan/tariff sewa yang mencerminkan kondisi pasar;
10. Menjaga kualitas penilaian dengan terus berupaya meningkatkan kompetensi Penilai.

Demikian Laporan Kinerja (LAKIN) KPKNL Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2021 ini diselesaikan semoga dapat bermanfaat bagi para pegawai KPKNL Padangsidimpuan khususnya, serta dapat menjadi bahan pimpinan dalam mengambil kebijakan.

-----oOo-----



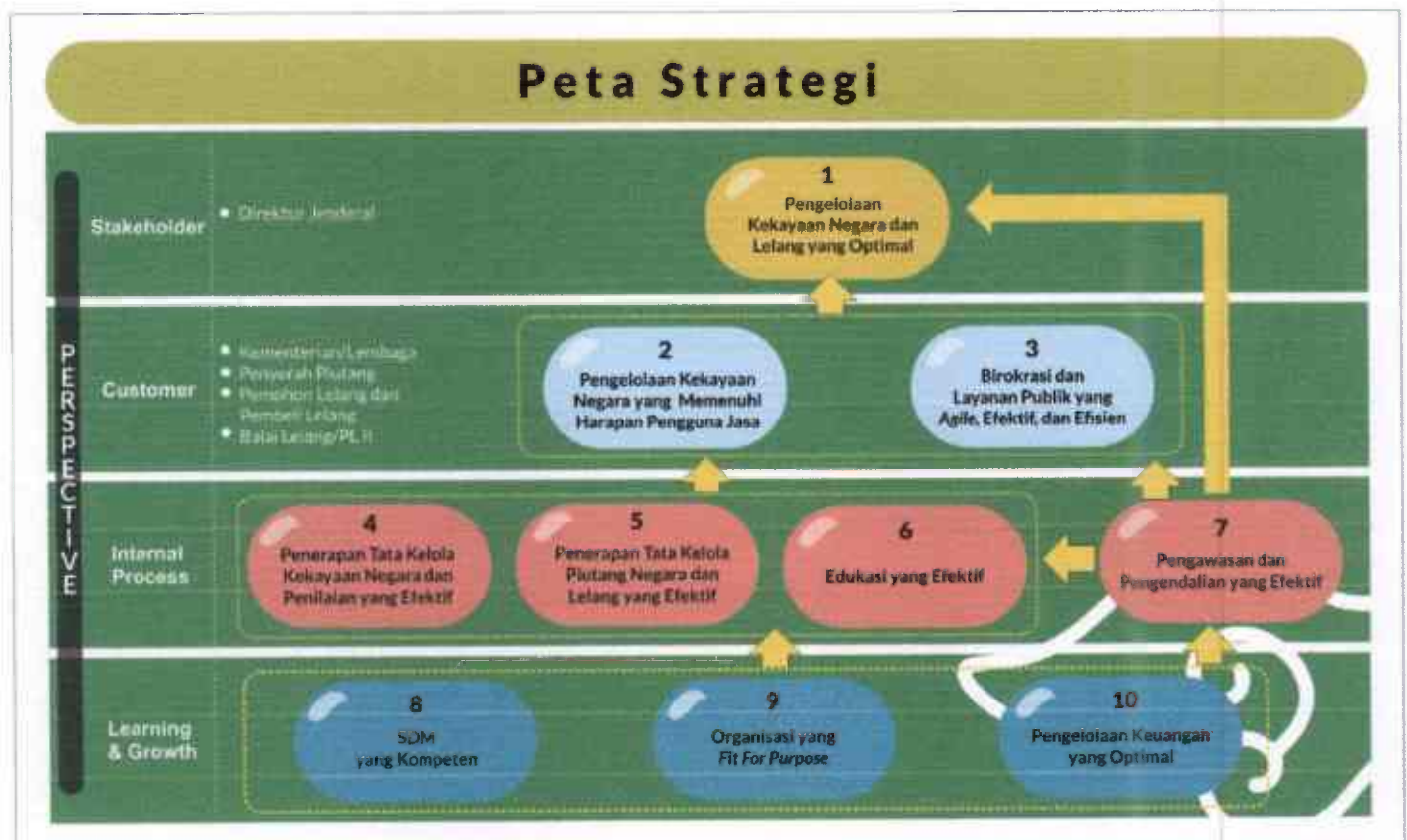
**KONTRAK KINERJA  
NOMOR 10/KN.14/2021**

**KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANGSIDIMPUAN  
KANTOR WILAYAH DJKN SUMATERA UTARA  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2021**

**Pernyataan Kesanggupan**

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padangsidempuan saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANGSIDIMPUAN**  
**KANTOR WILAYAH DJKN SUMATERA UTARA**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	1a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	62%
		1b-CP Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan KN dan Lelang (PNBP)	100%
		1c-CP Persentase Penurunan Nilai <i>Outstanding</i> Piutang Negara	100%
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memeuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang	88
		2b-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%
3.	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien	3a-CP Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	4,75
4.	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif	4a-CP Persentase Bidang tanah BMN yang disertifikasi	100%
		4b-CP Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
		4c-CP Deviasi Ketergunaan hasil Penilaian	22%
5.	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	5a-CP Persentase Efektivitas Penyelesaian BKP	100%
		5b-CP Persentase Produktivitas Lelang	35%
		5c-CP Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	92%
		5d-CP Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	12,5%
6.	Edukasi yang Efektif	6a-N Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	89
7.	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	7a-CP Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	85%
8.	SDM yang Kompeten	8a-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
9.	Organisasi yang Fit For Purpose	9a-N Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK	75
		9b-N Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	75
		9c-N Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	80
10.	Pengelolaan Keuangan yang Optimal	10a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%

Program/Kegiatan	Anggaran
<b>Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko</b>	<b>256.258.000</b>
1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	19.250.000
2. Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	23.642.000
3. Pengelolaan Aset	213.366.000
4. Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara	-
5. Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara	-
6. Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif	-
<b>Dukungan Manajemen</b>	<b>2.204.845.000</b>
1. Legislasi dan Litigasi	24.134.000
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	2.146.583.000
3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	15.288.000
4. Pengelolaan Organisasi dan SDM	-
5. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	18.840.000
6. Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi	-

Medan, 29 Januari 2021

Kepala Kantor Wilayah DJKN  
Sumatera Utara,

  
Tedy Syandriadi

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang  
Padangsidempuan

  
Haryanto

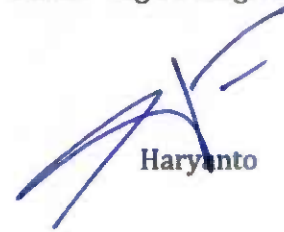
**RINCIAN TARGET CAPAIAN KINERJA**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANGSIDIMPUAN**  
**KANTOR WILAYAH DJKN SUMATERA UTARA**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA TAHUN 2021**

No	SS, IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
<b>1</b>	<b>Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal</b>							
1a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	-	50%	50%	55%	55%	62%	62%
1b-CP	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan KN dan Lelang (PNBP)	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
1c-CP	Persentase Penurunan Nilai <i>Outstanding</i> Piutang Negara	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
<b>2</b>	<b>Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa</b>							
2a-CP	Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang	88	88	88	88	88	88	88
2b-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%
<b>3</b>	<b>Birokrasi dan Layanan Publik yang <i>Agile</i>, Efektif, dan Efisien</b>							
3a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	-	-	-	-	-	4,75	4,75
<b>4</b>	<b>Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif</b>							
4a-CP	Persentase Bidang tanah BMN yang disertifikasi	-	20%	20%	60%	60%	100%	100%
4b-CP	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	15%	45%	45%	75%	75%	100%	100%
4c-CP	Deviasi Ketergunaan hasil Penilaian	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%
<b>5</b>	<b>Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif</b>							
5a-CP	Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
5b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	15%	20%	20%	25%	25%	35%	35%
5c-CP	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%
5d-CP	Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%
<b>6</b>	<b>Edukasi yang Efektif</b>							
6a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	-	89	89	-	89	89	89
<b>7</b>	<b>Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif</b>							
7a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	-	40%	40%	-	40%	85%	85%
<b>8</b>	<b>SDM yang Kompeten</b>							
8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%
<b>9</b>	<b>Organisasi yang <i>Fit For Purpose</i></b>							
9a-N	Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap kriteria ZI menuju	-	-	-	-	-	75	75

No	SS, IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
	WBK							
9b-N	Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	-	-	-	-	-	75	75
9c-N	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	80	80	80	80	80	80	80
<b>10</b>	<b>Pengelolaan Keuangan yang Optimal</b>							
10a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%

Medan, 29 Januari 2021

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara  
Dan Lelang Padangsidimpuan,



Haryanto

Sasaran Kerja Pegawai

No	I. PEJABAT PENILAI		No	II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	
1	Nama	Tedy Syandriadi	1	Nama	Haryanto
2	NIP	19650829 199103 1 001	2	NIP	19720825 199301 1 001
3	Pangkat/ Gol. Ruang	Pembina Utama Madya / IV/d	3	Pangkat/ Gol. Ruang	Pembina / IV/a
4	Jabatan	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara	4	Jabatan	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padangsidempuan
5	Unit Kerja	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara	5	Unit Kerja	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padangsidempuan

No	III. KEGIATAN TUGAS POKOK JABATAN	ANGKA KREDIT	TARGET			
			KUANTITAS / OUTPUT	KUALITAS / MUTU	WAKTU	BIAYA
1	Meningkatkan Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	-	62%	100	12 bulan	-
2	Meningkatkan Penerimaan Negara dari Pengelolaan KN dan Lelang (PNBP)	-	100%	100	12 bulan	-
3	Menurunkan Nilai <i>Outstanding</i> Piutang Negara	-	100%	100	12 bulan	-
4	Mewujudka Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang	-	88	100	12 bulan	-
5	Meningkatkan Realisasi Pokok Lelang	-	100%	100	12 bulan	-
6	Mewujudkan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	-	4,75	100	12 bulan	-
7	Mensertifikasi Bidang tanah BMN	-	100%	100	12 bulan	-
8	Mengimplementasikan Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	-	100%	100	12 bulan	-
9	Meningkatkan Ketergunaan hasil Penilaian	-	78%	100	12 bulan	-
10	Meningkatkan Efektivitas Penyelesaian BKPN	-	100%	100	12 bulan	-
11	Meningkatkan Produktivitas Lelang	-	35%	100	12 bulan	-
12	Melaksanakan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	-	92%	100	12 bulan	-
13	Meningkatkan Akurasi Data PNBP Fungsional DJKN	-	87,5%	100	12 bulan	-
14	Meningkatkan efektivitas edukasi dan komunikasi	-	89	100	12 bulan	-
15	Menindaklanjuti persetujuan pengelolaan kekayaan negara	-	85%	100	12 bulan	-
16	Mengembangkan kompetensi pegawai	-	100%	100	12 bulan	-
17	Mewujudkan Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK	-	75	100	12 bulan	-
18	Mewujudkan Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	-	75	100	12 bulan	-
19	Melaksanaan FGD Pejabat Administrator	-	80	100	12 bulan	-
20	Meningkatkan Kualitas pelaksanaan anggaran	-	95,5%	100	12 bulan	Rp 2,46M

Pejabat Penilai,

Tedy Syandriadi

NIP 19650829 199103 1 001

Medan, 29 Januari 2021

PNS yang Dinilai,

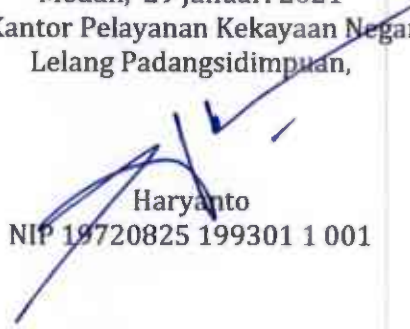
Haryanto

NIP 19720825 199301 1 001

**INISIATIF STRATEGIS  
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANGSIDIMPUAN  
KANTOR WILAYAH DJKN SUMATERA UTARA  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2021**

No	Indikator Kinerja Utama	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya
1	SS: Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal  IKU: Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	Optimalisasi BMN	1. Meningkatkan pengelolaan BMN yang memberikan manfaat sosial dan ekonomi terhadap masyarakat  2. BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang terindikasi <i>underutilized/ idle</i> yang tidak sedang dimanfaatkan diajukan pemanfaatannya	12 Bulan	Seksi PKN	
2	SS : Organisasi yang <i>fit for purpose</i>  IKU : Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK	Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi	Predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi	12 Bulan	Subbagian Umum Seksi Kepatuhan Seksi PKN Seksi Pelayanan Penilaian Seksi Piutang Negara Seksi Pelayanan Lelang Seksi Hukum dan Informasi	

Medan, 29 Januari 2021  
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padangsidimpuan,

  
Haryanto  
NIP 19720825 199301 1 001



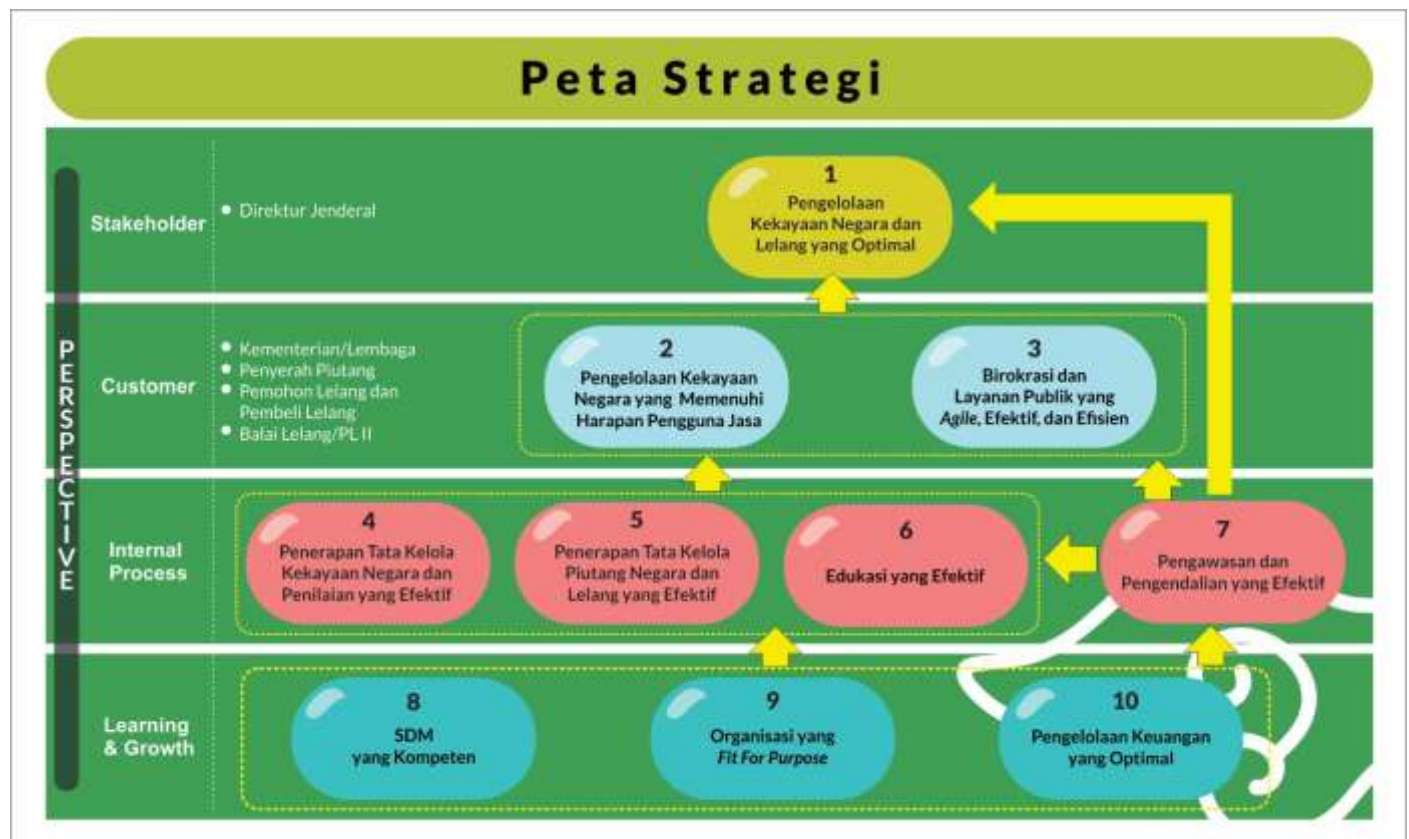
**KONTRAK KINERJA  
NOMOR 10.1/KN.14/2021**

**KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANGSIDIMPUAN  
KANTOR WILAYAH DJKN SUMATERA UTARA  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2021**

**Pernyataan Kesanggupan**

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padangsidimpuan saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANGSIDIMPUAN**  
**KANTOR WILAYAH DJKN SUMATERA UTARA**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	1a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	62%
		1b-CP Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan KN dan Lelang (PNBP)	100%
		1c-CP Persentase Penurunan Nilai <i>Outstanding</i> Piutang Negara	100%
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang	88
		2b-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%
3.	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien	3a-CP Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	4,75
4.	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif	4a-CP Persentase Bidang tanah BMN yang disertifikasi	100%
		4b-CP Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
		4c-CP Deviasi Ketergunaan hasil Penilaian	22%
5.	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	5a-CP Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	100%
		5b-CP Persentase Produktivitas Lelang	35%
		5c-CP Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	92%
		5d-CP Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	12,5%
6.	Edukasi yang Efektif	6a-N Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	89
7.	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	7a-CP Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	85%
8.	SDM yang Kompeten	8a-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
9.	Organisasi yang Fit For Purpose	9a-N Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK	75
		9b-N Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	75
		9c-N Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	80
10.	Pengelolaan Keuangan yang Optimal	10a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%

<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>
<b>Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko</b>	<b>145.178.000</b>
1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	<b>220.000</b>
2. Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	-
3. Pengelolaan Aset	<b>144.958.000</b>
4. Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara	-
5. Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara	-
6. Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif	-
<b>Dukungan Manajemen</b>	<b>1.932.730.000</b>
1. Legislasi dan Litigasi	<b>13.358.000</b>
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	<b>1.907.232.000</b>
3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	<b>5.680.000</b>
4. Pengelolaan Organisasi dan SDM	-
5. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	<b>6.460.000</b>
6. Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi	-

Medan, 15 Oktober 2021

Kepala Kantor Wilayah Sumatera Utara

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang  
Padangsidempuan

ttd

ttd

Tedy Syandriadi

Raden Hariyadi Murti Kurniawan

**RINCIAN TARGET CAPAIAN KINERJA**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANGSIDIMPUAN**  
**KANTOR WILAYAH DJKN SUMATERA UTARA**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA TAHUN 2021**

No	SS, IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
<b>1</b>	<b>Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal</b>							
1a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	-	-	-	-	-	62%	62%
1b-CP	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan KN dan Lelang (PNBP)	-	-	-	-	-	23,56%	23,56%
1c-CP	Persentase Penurunan Nilai <i>Outstanding</i> Piutang Negara	-	-	-	-	-	10%	10%
<b>2</b>	<b>Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa</b>							
2a-CP	Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang	-	-	-	-	-	88	88
2b-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	-	-	-	-	-	1,25%	1,25%
<b>3</b>	<b>Birokrasi dan Layanan Publik yang <i>Agile</i>, Efektif, dan Efisien</b>							
3a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	-	-	-	-	-	4,75	4,75
<b>4</b>	<b>Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif</b>							
4a-CP	Persentase Bidang tanah BMN yang disertifikasi	-	-	-	-	-	7,5%	7,5%
4b-CP	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	-	-	-	-	-	14%	14%
4c-CP	Deviasi Ketergunaan hasil Penilaian	-	-	-	-	-	22%	22%
<b>5</b>	<b>Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif</b>							
5a-CP	Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	-	-	-	-	-	16%	16%
5b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	-	-	-	-	-	35%	35%
5c-CP	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	-	-	-	-	-	92%	92%
5d-CP	Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	-	-	-	-	-	12,5%	12,5%
<b>6</b>	<b>Edukasi yang Efektif</b>							
6a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	-	-	-	-	-	89	89
<b>7</b>	<b>Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif</b>							
7a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	-	-	-	-	-	85%	85%
<b>8</b>	<b>SDM yang Kompeten</b>							
8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	-	-	-	-	-	100%	100%
<b>9</b>	<b>Organisasi yang <i>Fit For Purpose</i></b>							
9a-N	Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap kriteria ZI menuju	-	-	-	-	-	75	75

No	SS, IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
	WBK							
9b-N	Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	-	-	-	-	-	75	75
9c-N	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	-	-	-	-	-	80	80
<b>10</b>	<b>Pengelolaan Keuangan yang Optimal</b>							
10a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	-	-	-	-	-	95,5%	95,5%

Medan, 15 Oktober 2021

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara  
Dan Lelang Padangsidempuan,

ttd

Raden Hariyadi Murti Kurniawan

## SASARAN KINERJA PEGAWAI

KANTOR WILAYAH DJKN SUMATERA UTARA  
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN  
LELANG PADANGSIDIMPUAN

PERIODE PENILAIAN  
1 OKTOBER S.D. 31 DESEMBER 2021

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA		
NAMA	Raden Hariyadi Murti Kurniawan	NAMA	Tedy Syandriadi	
NIP	19751007 199602 1 001	NIP (*opsional)	19650829 199103 1 001	
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina / IV/a	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Madya/ IV/d	
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padangsidempuan	JABATAN	Kepala Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara	
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padangsidempuan	UNIT KERJA	Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara	
NO	RENCANA KINERJA	INDIKATOR KINERJA		
		INDIVIDU		
(1)	(2)	(3)		
A. KINERJA UTAMA				
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	1.1	Tingkat Kesesuaian BMN dengan SBSK	62%
		1.2	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang (PNBP)	23,56%
		1.3	Persentase Penurunan Nilai <i>Outstanding</i> Piutang Negara	10%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2.1	Indeks Ketepatan Waktu Layanan Kekayaan Negara dan Lelang	88
		2.2	Persentase Realisasi Pokok Lelang	1,25%
3	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif dan Efisien	3.1	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	4,75
4	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif	4.1	Persentase Bidang Tanah BMN yang disertifikasi	7,5%
		4.2	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	14%
		4.3	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	22%
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	5.1	Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	16%
		5.2	Persentase Produktivitas Lelang	35%
		5.3	Persentase Pelaksanaan Lelang E-auction dan E-conventional Auction	92%
		5.4	Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	12,5%
6	Edukasi yang Efektif	6.1	Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi	89
7	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	7.1	Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara	85%
8	SDM yang Kompeten	8.1	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100%
9	Organisasi yang Fit For Purpose	9.1	Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	75

		9.2 Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK	75 WBK/85 WBBM
		9.3 Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	80
10	Pengelolaan Keuangan yang Optimal	10.1 Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5%
<b>B. KINERJA TAMBAHAN</b>			
1			

Medan, 15 Oktober 2021

Pegawai yang Dinilai,

Pejabat Penilai Kinerja,

ttd

ttd

Raden Hariyadi Murti Kurniawan  
NIP 19751007 199602 1 001

Tedy Syandriadi  
NIP 19650829 199103 1 001

**INISIATIF STRATEGIS**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANGSIDIMPUAN**  
**KANTOR WILAYAH DJKN SUMATERA UTARA**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2021**

No	Indikator Kinerja Utama	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya
1	SS: Pengelolaan kekayaan negara yang optimal  IKU: Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	Optimalisasi BMN (KOIN)	1. Meningkatkan pengelolaan BMN yang memberikan manfaat sosial dan ekonomi terhadap masyarakat  2. BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang terindikasi <i>underutilized/ idle</i> yang tidak sedang dimanfaatkan diajukan pemanfaatannya	3 bulan	Seksi PKN	
2	SS : Organisasi yang <i>fit for purpose</i>  IKU : Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI menuju WBK	Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi	Predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi	3 bulan	Subbagian Umum Seksi Kepatuhan Internal Seksi PKN Seksi Pelayanan Penilaian Seksi Piutang Negara Seksi Pelayanan Lelang Seksi Hukum dan Informasi	

Medan, 15 Oktober 2021  
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padangsidimpuan,

ttd

Raden Hariyadi Murti Kurniawan  
NIP 19751007 199602 1 001

**NILAI KINERJA ORGANISASI**  
**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANGSIDIMPUAN**  
**PERIODE s.d DESEMBER 2021**  
**TAHUN 2021**

Kode	IKU	V/C	Target s.d. Q4	Realisasi s.d. Q4	Bobot Awal	Bobot Akhir IKU	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%	Keterangan
	Stakeholder Perspective(25%)							30.00%	
1	Pengelolaan kekayaan negara yang optimal							120.00%	
1a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	P/L	62%	75.19%	19%	40%	121.270%	120.00%	hijau
1b-CP	Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	P/M	100%	127.42%	14%	30%	127.418%	120.00%	hijau
1c-CP	Persentase Penurunan outstanding piutang negara (Saldo PNDS s.d 2017)	P/M	100%	142%	14%	30%	141.51%	120.00%	hijau
	Customer Perspective(15%)							16.34%	
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							116.85%	
2a-CP	Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang	P/H	88.00	99.30	11%	44%	112.84%	112.84%	hijau
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	P/M	100%	165.47%	14%	56%	165.47%	120.00%	hijau
3	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien							101.05%	
3a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL	E/M	4.75	4.80	21%	100%	101.05%	101.05%	hijau
	Internal Process Perspective (30%)							33.33%	
4	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif							120.00%	
4a-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	P/L	100%	126.50%	19%	43%	126.50%	120.00%	hijau
4b-CP	Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	P/H	100%	123.88%	11%	25%	123.88%	120.00%	hijau
4c-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	P/M	22%	3.79%	14%	32%	182.77%	120.00%	hijau
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							112.17%	
5a-CP	Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	P/M	100%	100.00%	14%	25%	100.00%	100.00%	hijau
5b-CP	Persentase produktivitas lelang	P/M	35.00%	44.48%	14%	25%	127.07%	120.00%	hijau
5c-CP	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-convention	P/M	92.00%	100.00%	14%	25%	108.70%	108.70%	hijau
5d-CP	Deviasi Data PNPB Fungsional DJKN	P/M	12.50%	0.00%	14%	25%	200.00%	120.00%	hijau
6	Edukasi yang efektif							104.74%	
6a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	P/M	89	93.22	14%	100%	104.74%	104.74%	hijau
7	Pengawasan dan pengendalian yang efektif							107.51%	
7a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	P/M	85%	91.38%	14%	100%	107.51%	107.51%	hijau
	Learning & Growth Perspective (30%)							33.93%	
8	SDM yang kompeten							120.00%	
8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	P/M	100%	120.00%	14%	100%	120.00%	120.00%	hijau
9	Organisasi yang fit for purpose							120.00%	
9a-N	Nilai pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK/WBBM	P/M	75	98.28	14%	33%	131.04%	120.00%	hijau
9b-N	Nilai hasil review pengelolaan kinerja	P/M	75.00	99.75	14%	33%	133.00%	120.00%	hijau
11c-N	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	P/M	80	99.48	14%	33%	124.34%	120.00%	hijau
10	Pengelolaan Keuangan yang Optimal							99.32%	
10a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	P/M	95.5%	94.85%	14%	100%	99.32%	99.32%	kuning
<b>Nilai Kinerja Organisasi (NKO)</b>								<b>113.61%</b>	<b>hijau</b>



**panrb**

KEMENTERIAN  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI

**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI**

# KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANGSIDIMPUAN

Unit Kerja ini telah meraih predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

Apabila ditemukan praktek pungutan liar, calo, gratifikasi  
dan aduan atas unit kerja ini maka dapat memasukkan aduan ke  
[www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id) dan [pmpzi.menpan.go.id](http://pmpzi.menpan.go.id)

Jakarta, 20 Desember 2021



Menteri  
Pendayagunaan Aparatur Negara  
dan Reformasi Birokrasi

Tjahjo Kumolo



qrcodepmpzi



qrcodelapor



## Piagam Penghargaan

PIAG-06/KN.1/2021

Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara  
memberi penghargaan kepada

# KPKNL Padangsidimpuan

atas partisipasinya dalam  
Lomba Pengelolaan Arsip Unit Vertikal DJKN Tahun 2021

Jakarta, 15 November 2021  
Sekretaris DJKN



**DEDI SYARIF USMAN**